

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 27.2363,10 km², Jumlah Penduduk 550.994 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 20,17 jiwa/km², 18 kecamatan, 225 desa/kelurahan. Sementara Kecamatan Tenggarong yang merupakan lokasi penelitian dengan luas 398,10 km² dengan jumlah penduduk 72.458 dengan kepadatan 182,01 jiwa/km². Kecamatan Tenggarong merupakan ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari 13 Desa/Kelurahan. Jumlah sekolah dasar (SD) Negeri di Kutai Kartanegara berjumlah 436 sekolah, dan jumlah siswa 76.033 dibawah penanganan 7.429 guru. Sementara jumlah sekolah dasar swasta di Kutai Kartanegara adalah 18 sekolah dengan jumlah siswa 3.329 dengan tenaga guru 287 orang. Dan di kecamatan Tenggarong Sekolah dasar negeri berjumlah 38 sekolah dengan jumlah siswa 10.270 orang. Sedangkan jumlah sekolah dasar swasta jenjang tingkat SD yang berada di kecamatan tenggarong berjumlah empat sekolah dasar terdiri dari dua sekolah dasar dibawah naungan dinas pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara dan dua Madrasah Ibtidaiyah (MI) dibawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah siswa keseluruhan sekolah dasar swasta berjumlah 3.329 orang siswa.¹ Dari

¹ BPS. 2015. *Badan Pusat Statistik (BPS) Kutai Kartanegara*.

empat jenjang sekolah dasar swasta di kecamatan Tenggarong maka peneliti mengambil fokus penelitian di tiga sekolah dasar yaitu SD IT Nurul Ilmi Tenggarong, SD Muhammadiyah Tenggarong, dan MI Asy Syauqi Tenggarong.

1. SDIT Nurul Ilmi Tenggarong

Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Nurul Ilmi Tenggarong merupakan sekolah swasta yang terletak di kecamatan Tenggarong sebagai salah satu dari beberapa sekolah favorit untuk tingkat SD di kabupaten Kutai Kartanegara khususnya di kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dengan alamat Jalan Drs. H. Ahmad Dahlan kelurahan Baru Tenggarong. Berdasarkan data dokumentasi SD IT memperoleh sederet prestasi akademik maupun non akademik yang tiga tahun terakhir ini sebagai peringkat pertama tertinggi dalam perolehan nilai Ujian Nasional sehingga dari prestasi tersebut animo masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat terlihat dari simpati orang tua siswa menyekolahkan putra putrinya ke SD IT Nurul Ilmi Tenggarong makin meningkat hingga kini jumlah siswa SD IT telah mencapai 740 orang. Meskipun sekolah ini cukup dibilang masih muda, namun SD IT Nurul Ilmi Tenggarong membuktikan keseriusannya dalam mengelola dan mengembangkan dunia pendidikan di kabupaten Kutai Kartanegara.

a. Sejarah Singkat SD IT Nurul Ilmi Tenggarong

Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Ilmi Tenggarong yang berada dalam naungan Yayasan Nurul 'Ilmi Tenggarong. Yayasan ini bergerak

dalam bidang pendidikan, mula-mula Yayasan Nurul 'Ilmi mendirikan LPK Nurul 'Ilmi kemudian TKIT Nurul 'Ilmi Tenggarong. Kemudian setelah lembaga ini dapat dukungan dan respon yang positif dari masyarakat, sekitar pada akhir tahun 2004 Yayasan Nurul Ilmi Tenggarong mengadakan rapat untuk membahas kelanjutan Siswa TKIT Nurul 'Ilmi dan kemudian diputuskan dengan sisa Kas Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah) Pendiri dan Pengurus Yayasan bertekad untuk mendirikan Sekolah Dasar yang saat ini diberi nama sekolah dasar Islam Terpadu Nurul 'Ilmi Tenggarong. Dalam waktu yang hanya sekitar 4 bulan itulah kami menyiapkan pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu.²

”Alhamdulillah dari kemauan, tekad dan kerja keras Yayasan Nurul 'Ilmi dan masyarakat sekitar sekolah dasar Islam Terpadu dapat terbangun, yang saat ini telah berusia 8 tahun dan alhamdulillah dapat tanggapan yang sangat positif dari masyarakat Tenggarong dan sekitarnya. Tentunya dari perjalanan selama ini telah membuahkan hasil yang patut untuk disyukuri. Berbagai pengalaman dan prestasi sudah pernah kita raih walaupun dibilang usia kami sangat muda”³

Dengan bergulirnya waktu, berbagai perubahan terjadi baik dari segi fisik maupun management sekolah dan kedepannya SD IT mencanangkan perlu dibangun sinergi di semua pihak dalam rangka melaksanakan perencanaan dan pengembangan sekolah dengan melaksanakan Visi Sekolah dan mempertajam Misi Sekolah ke arah yang lebih baik.

²*Dokumentasi profil SD IT Nurul Ilmi Tenggarong* (sumber: Kepala Tata Usaha SD IT Nurul Ilmi Tenggarong, tanggal 21 Maret 2016 Pukul 09.20 Wita).

³Ahmad Zainuddin, Kepala Sekolah SD IT, *Wawancara Terbuka, di ruang Kepala Sekolah*, Tanggal 21 Mei 2016 Pukul 08.00 Wita.

Sekolah Dasar Islam Terpadu bertujuan membentuk siswa/siswi agar :

- 1) Memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan sehingga memiliki kemampuan akademik yang lebih tinggi untuk dapat melanjutkan kejenjang berikutnya.
- 2) Membentuk pribadi anak dengan bimbingan pengalaman yang Islami dalam segala aspek kehidupan.
- 3) Sikap mandiri dan kemampuan menyesuaikan untuk dapat bersama di tengah-tengah masyarakat sedini mungkin.

b. Visi dan Misi

Visi SD IT Nurul Ilmi Tenggarong adalah “Mewujudkan sekolah Islam terpadu yang unggul, bersih, sehat dan berkarakter, berdasarkan IMTAQ & IPTEK dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Unggul dalam kegiatan keagamaan
- 2) Santun dalam sikap dan perilaku yang Islami
- 3) Unggul dalam mutu dan prestasi
- 4) Unggul dalam pembiasaan hidup sehat
- 5) Unggul dalam kejujuran, kedisiplinan dan kreatifitas
- 6) Unggul dalam penanaman sikap Cinta tanah air dan bangsa

Misi SD IT Nurul Ilmi Tenggarong adalah sebagai berikut:

- 1) Menerapkan sistem pendidikan Islam Terpadu yang mengintegrasikan ayat-ayat qouliyah dan kauniyah, Iman dan ‘Amal, Ruhiah dan

Jasadiyah dalam lingkungan pendidikan yang Islami, Sehat, Bersih, aman dan nyaman.

- 2) Menyelenggarakan pendidikan yang menjadi pusat inovasi dan inspirasi pengembangan mutu pendidikan.
- 3) Membiasakan pola hidup jujur, disiplin dan bertanggung jawan
- 4) Membiasakan siswa untuk ber sopan - santun
- 5) Membiasakan pola hidup yang berkarakter.
- 6) Membiasakan pola hidup bersih, sehingga tercipta sekolah berwawasan dan berbudaya lingkungan yang sehat
- 7) Mengembangkan SDM yang kreatif, trampil, inovatif dalam pemanfaatan IT
- 8) Menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa.

c. Tenaga Pendidik dan Kependidikan

SD IT Nurul Ilmi Tenggarong memiliki tenaga pendidik sebanyak 47 orang dengan rincian 39 orang Guru Tetap Yayasan (GTY) dan delapan Guru Tidak Tetap Yayasan (GTTY), dari 47 orang guru tersebut yang sudah sertifikasi baru 10 orang. Sementara tenaga kependidikan SD IT Nurul Ilmi Tenggarong sebanyak 6 Orang Pegawai Tidak Tetap Yayasan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran.

d. Keadaan Siswa

Jumlah keseluruhan siswa dari kelas 1-6 pada tahun pelajaran 2015-2016 tercatat menurut data dari Kepala TU SD IT Nurul Ilmi Tenggarong sebanyak 740 siswa dengan rincian terlampir.

e. Sarana Prasarana

Pendidikan yang berkualitas harus ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai, tanpa sarana prasarana yang memadai maka dapat menghambat dari menciptakan pendidikan yang berkualitas, sebagaimana yang dilakukan oleh SD IT Nurul Ilmi dalam menunjang kegiatan pembelajaran yang berkualitas, perincian terlampir.

d. Alokasi Waktu Pembelajaran

Adapun alokasi waktu pembelajaran dan jumlah beban kerja SDIT Nurul Ilmi Tengagarong sebagai berikut:

Tabel. 4.1 Alokasi Waktu Pembelajaran SDIT Nurul Ilmi

Mata Pelajaran/Tugas Tambahan	Jumla Rombel	Jam/ Minggu	Beban Kerja
1. Guru kelas I B 2. Pramuka 3. Guru piket	1	24 2 2	28
1. Guru kelas V C 2. Kerohanian 3. Pramuka 4. Guru piket	1	27 2 2 2	33
1. Qiroaty kelas I C, II C, III C, IV C, VC, VI C 2. Guru piket	6	24 2	26
1. Guru kelas III C 2. Tahfiz kelas III C 3. Kerohanian 4. Pramuka 5. Guru piket	1 1	24 4 4 2 2	36
1. Guru kelas IV A 2. Kerohanian 3. Pramuka 4. Guru piket	1	27 2 2 2	33
1. Bahasa Inggris kelas IV ABCD, V ABC, VI ABCD 2. Guru piket	11	22 2	24
1. Bimbel IPA		2	2

Mata Pelajaran / Tugas Tambahan	Jumlah Rombel	Jam/ Minggu	Beban Kerja
1. Guru kelas I D 2. Pramuka 3. Guru piket	1	24 2 2	28
1. Asisten guru kelas I A 2. Tahfiz kelas I A 3. Qiroati kelas I A, II E, III D 4. Pramuka 5. Guru piket	1 1 3	12 2 12 2 2	30
1. Guru kelas II A 2. Kerohanian 3. Pramuka 4. Guru piket	1	24 2 2 2	30
1. Asisten guru kelas I C 2. Qiroati kelas I C, II C 3. Pramuka 4. Guru piket	1 2	12 8 2 2	24
1. Asisten guru kelas I D 2. Qiroati kelas I D, II D, IV D 3. Tahfiz kelas I D 4. Guru piket	1 3 1	12 12 2 2	28
1. Penjaskes kelas I ABCD, II ABCD, IIIAB 2. Kerohanian 3. Pramuka 4. Guru piket	10	20 4 4 2	30
1. Guru kelas IV D 2. Kerohanian 3. Mentoring 4. Guru piket	1	27 2 2 2	33
1. Asisten guru kelas I B 2. Qiroati kelas I B, II E 3. Tahfiz kelas I B 4. Pramuka 5. Guru piket	1 2 1	12 8 2 2 2	26
1. Qiroati kelas I B, II B, III B, IV B, V B, VI B 2. Guru piket	6	24 2	26
1. Qiroati kelas I B, II B, III B, IV B, V B, VI B 2. Guru piket	6	24 2	26
1. Qiroati kelas I B, II B, III B, IV B, V B, VI B 2. Guru piket	6	24 2	26
Jumlah	70	489	489

2. SD Muhammadiyah Tenggara

SD Muhammadiyah Tenggara berada di Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Tenggara. SD Muhammadiyah Tenggara yang telah berdiri sejak tahun 1993 sudah meluluskan ribuan siswa, tercatat pada tahun ajaran 2015-2016 ini, siswa SD Muhammadiyah berjumlah 1112 siswa sebagai penyandang sekolah dengan siswa terbanyak tingkat sekolah dasar sekabupaten Kutai Kartanegara. SD Muhammadiyah terletak di Jalan Danau Aji kelurahan Melayu tidak jauh dari pusat keramaian yaitu pasar Tangga Arung kecamatan Tenggara. Berbagai macam prestasi dan penghargaan telah diraih mulai tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. SD Muhammadiyah sering dijadikan pijakan oleh sekolah-sekolah yang lain karena pengalaman dan keberhasilannya dalam mengelola pendidikan.

a. Sejarah Singkat SD Muhammadiyah Tenggara

Sekolah Dasar Muhammadiyah Tenggara didirikan pada tanggal 15 Juli 1991 yang didorong oleh motivasi pertama kali antara lain:

- 1) Belum adanya satu pun amal usaha persyarikatan dibidang pendidikan tingkat sekolah dasar.
- 2) Menyadari belum adanya sekolah Islam dikota Tenggara, sehingga pejabat Pemerintah dan tokoh-tokoh muslim memasukkan putra dan putrinya kesekolah umum hal ini memprihatinkan warga Muhammadiyah.

- 3) Turut berupaya meningkatkan mutu pendidikan dasar di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gedung SD Muhammadiyah yang terletak di Jalan Danau Aji Mulai dibangun dengan MILAD Muhammadiyah ke 83 tanggal 18 November 1993 dengan ditandai pemancangan tiang pertama oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Gedung tersebut dibangun diatas sebidang tanah 740 m². Adapun para pendirinya adalah:

- 1) Drs. H. Ahmad Husaini
- 2) H. Aziz Tulang BA
- 3) Drs. Mahfud
- 4) H. Musannif (alm)
- 5) H. Helni (alm)
- 6) H. Mansur Aziz
- 7) A. Rahmad Hamid (alm)
- 8) Selamat Waris
- 9) Drs. Chaiyun Arifin
- 10) Drs. Ibrahim Salim
- 11) Drs. Purwadi

Karena Organisasi Muhammadiyah merupakan organisasi hirarki maka akte notaris lembaga pendidikannya telah disahkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1974 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan *Nomor Akte Notaris: 23628/MPK/74*. Sementara SD Muhammadiyah Tenggarong mulai beroperasi/membuka tahun ajaran baru

pada tanggal 7 Mei 1994 dengan jumlah pendaftar perdana sebanyak 42 siswa.

Tujuan utama pendirian SD Muhammadiyah Tenggara adalah:

- 1) Siswa beriman dan bertaqwa kepada Allah swt dan berakhlakul karimah, cakap, percaya diri, cinta tanah air, berguna bagi masyarakat, Negara dan Agama.
- 2) Siswa sehat jasmani dan rohani dalam mewujudkan masyarakat madani.
- 3) Siswa memiliki dasar-dasar pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan untuk bersaing di sekolah Menengah pertama yang diunggulkan masyarakat.
- 4) Mengenal dan mencintai bangsa, masyarakat dan kebudayaannya.
- 5) Siswa kreatif, terampil dalam belajar untuk mengemangkan diri secara terus menerus.

Oleh karena itu dalam kegiatan dipadukan antara pengajaran di sekolah dan kegiatan pengajian Al-Qur'an dengan materi ayat-ayat pilihan yang disesuaikan dengan pelajaran agama di sekolah yang menggunakan metode tahfidz berikut terjemahannya terutama ayat-ayat yang berkenaan dengan akhlak (moral).

Pada tahun 2007 SD Muhammadiyah Tenggara Mendapatkan Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 3 Miliar dan Membangun Gedung berlantai tiga dengan sembilan Lokal. Sampai saat ini SD Muhammadiyah Tenggara telah mengeluarkan 26

angkatan/lulusan. Adapun yang menjabat sebagai ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tenggara saat ini adalah Bapak Marwindi dari hasil Musyawarah Cabang Tahun 2016 yang merupakan Pemegang wewenang atas perkembangan dan kemajuan Sekolah Dasar dan Menengah pada organisasi Muhammadiyah Cabang Tenggara.

Riwayat renovasi gedung SD Muhammadiyah Tenggara: Tahun 1991: Menggunakan gedung SMP Muhammadiyah. Tahun 1993: Membangun gedung permanen sejumlah empat lokal biaya swadaya dan infak para jamaah. Tahun 1997: Renovasi peningkatan menjadi lantai sebanyak lima lokal semi permanent, Tahun 2005-2007: Penambahan gedung baru lantai dua sebanyak delapan lokal dengan biaya swadaya perguruan Muhammadiyah: pembangunan gedung baru lantai tiga sebanyak sembilan lokal bantuan Pemkab Kutai Kartanegara. Dari tahun 1998 SD Muhammadiyah Tenggara mulai akreditasi sekolah yang tadinya bersetatus tercatat langsung memperoleh status disamakan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dengan nomor SK.8565/126.201/PPi/1998. Pada tahun 2006 pelaksanaan akreditasi kedua dengan standar Akreditasi "A" Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 006/BAS-KUKAR/IV/2006, tanggal 6 April 2006.

b. Visi dan Misi SD Muhammadiyah Tenggara

1) Visi

“Terciptanya sekolah ramah anak, unggul dalam prestasi, berkarakter islami, menguasai bahasa arab dan bahasa inggris, berakar pada budaya bangsa, berwawasan lingkungan serta berlandaskan imtaq dan iptek”

2) Misi

- a) Menyelenggarakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif untuk mengoptimalkan potensi dan prestasi akademik anak didik.
- b) Menumbuhkan, meningkatkan, penghayatan dan pengalaman terhadap nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada allah swt sesuai dengan al-qur`an dan as-sunnah.
- c) Menjadikan anak didik berjiwa sosial, berakhlak mulia dan peduli terhadap lingkungan.
- d) Membentuk jiwa anak didik yang mempunyai semangat hidup yang tinggi dan mampu menghadapi tantangan global.
- e) Mengembangkan sikap dan perilaku bermuhammadiyah bagi seluruh warga sekolah dan berdakwah amar ma`ruf nahi mungkar.
- f) Membudayakan 5s (senyum, sapa, salam, sopan dan santun) dan 9k (kedisiplinan, kebersihan, kerapian, kerajinan, kepemimpinan, kerjasama, kesopanan, kemandirian dan kejujuran).

c. Tujuan Umum Pendidikan SD Muhammadiyah Tenggara

- 1) Dapat mengamalkan ajaran Islam yang sebenar-benarnya sesuai dengan Al-Qur`an dan As-Sunnah serta berakhlak mulia, cakap, terampil dan percaya pada diri sendiri meraih prestasi akademik

dan non akademik sesuai yang diharapkan oleh orang tua dan pemerintah.

- 2) Menjadikan sekolah yang diminati masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat disekitar sekolah.
- 3) Menjadikan sekolah yang disiplin, aktif, kreatif dan mandiri serta membentuk anak didik menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas dan tangguh.

d. Struktur Pengurus Sekolah SD Muhammadiyah

SD Muhammadiyah berada dalam pembinaan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tenggara yang mempunyai wewenang pengawasan dan teknis edukatif, kemudian dipantau oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tenggara sebagai pembina penyelenggara edukatif yang menaungi sekolah Dasar. Sebagaimana dalam peraturan Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 3 Tahun 2012 tentang fungsi, tugas dan wewenang masing-masing tingkatan persyarikatan dalam mengelola amal usaha pendidikan sebagaimana terlampir.

e. Tenaga Edukatif

Tenaga eduktif SD Muhammadiyah Tenggara seluruhnya berjumlah 72 orang yang terdiri dari tenaga pendidik berjumlah 63 orang dengan rincian terlampir. Agar para siswa senantiasa bergairah dalam belajar, maka diterapkan model belajar aktif guna mengembangkan makna dan pengalaman belajar siswa yang sudah terbentuk sehingga kompetensi

yang dimiliki siswa tumbuh dan berkembang. Untuk mewujudkan belajar aktif tersebut, maka berbagai kiat diterapkan sekolah dalam kegiatan belajar mengajar dan media belajar seperti televisi, LCD, VCD, lingkungan sekolah, alam dan objek-objek yang ada. Selain itu membentuk tim pengajaran bidang studi melaksanakan praktek keterampilan computer, seni musik dan olah raga, belajar di perpustakaan, belajar diluar sekolah dan mengadakan majalah dinding (madding).

f. Alokasi Waktu Pengajaran

Alokasi waktu pembelajaran SD Muhammadiyah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Alokasi Waktu Pembelajaran SD Muhammadiyah

Mata Pelajaran	Kelas						Jumlah
	I A-F	II A-E	III A-E	IV A-E	V A_E	VI A-E	
Agama Islam	4	4	3	3	3	3	20
Kemuhammadiyah	2	2	2	2	2	2	12
Bahasa Arab	-	-	2	2	2	2	8
PPKn	2	2	2	2	2	2	12
Bahasa Indonesia	8	8	8	5	5	5	39
Matematika	8	8	8	6	6	6	42
IPA/ Sains	2	2	4	4	4	4	20
IPS	2	2	2	3	3	3	15
SBK	2	2	2	4	4	4	18
Penjaskes	2	2	2	4	4	4	18
Muatan Lokal							
a. Bahasa Inggris	2	2	2	4	4	4	18
b. Komputer	-	-	-	2	2	2	6
c. TPA	6	6	10	8	8	8	46
Jumlah	40	40	47	49	49	49	274

Sumber: Data TU SD Muhammadiyah Tenggaraong, data diolah

g. Fasilitas

- 1) Gedung lantai dua terdiri dari 16 ruang belajar
- 2) Gedung lantai tiga terdiri dari 9 ruang belajar

- 3) Ruang Kepala Sekolah, tata usaha dan ruang tamu
- 4) Ruang Wakil Kepala Sekolah dan Dewan Guru
- 5) Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
- 6) Ruang Laboratorium Komputer
- 7) Ruang laboratorium mata pelajaran
- 8) Ruang Hasta karya siswa
- 9) Ruang Perpustakaan
- 10) Masjid sebagai sentra kegiatan keagamaan dan Pendidikan Al-Qur'an
- 11) Ruang Koprasi
- 12) Kantin
- 13) Lapangan Futsal
- 14) Lapangan Bulu Tangkis
- 15) Lapangan Basket
- 16) Tenis Meja
- 17) Tama Sekolah
- 18) Kebun Apotik
- 19) Tempat Parkir

h. Kurikulum

Kurikulum yang digunakan dalam SD Muhammadiyah adalah Kurikulum 2013 sebagai sekolah piloting dari dinas pendidikan Kabupten Kutai Kartanegara serta menggunakan kurikulum Dikdasmen Muhammadiyah yang diperkaya sesuai dengan kemajuan zaman. Kegiatan

pembelajaran di SD Muhammadiyah Tenggarong merupakan 6 (enam) hari belajar sekolah, kegiatan belajar dimulai pukul 07.00 Wita s/d 13.30 Wita.

i. Program Layanan Belajar

Untuk mencapai target dan ketuntasan penugasan materi kurikulum SD Muhammadiyah Tenggarong menerapkan berbagai strategi, antara lain:

1) Program Kelas Unggulan

Program ini dilakukan untuk menuju sekolah unggul dengan mengklarifikasikan peserta didik sesuai dengan kecerdasannya. Setiap kelas dibagi menjadi kelas unggul, kelas sedang dan kelas binaan. Pelaksanaan kelas unggul menggunakan system promosi degradasi berdasarkan hasil tes Cawu/Semester yang diambil dari rangking 1 sampai dengan 10 dari kelas parallel.

2) Program Pengayaan

Program ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pengayaan, penguasaan materi kepada para siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata.

3) Program Remedial

Program ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada siswa yang mengalami keterlambatan penguasaan materi sehingga dianggap perlu mendapat tambahan pelayanan belajar dengan tujuan prestasi para siswa yang rendah dapat dinaikan.

j. Profil Keadaan Murid SD Muhammadiyah Tenggara

Keadaan siswa SD Muhammadiyah dari 3 Tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini terlampir.

k. Sasaran Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pendidikan

Sasaran peningkatan mutu pendidikan SD Muhammadiyah Tenggara melaksanakan pembinaan secara berkala. Pelatihan khusus dewan guru dan pertemuan secara rutin minimal satu bulan sekali untuk memecahkan masalah yang dihadapi dewan guru dalam melaksanakan tugas dan menampung semua aspirasi yang menunjang peningkatan mutu pendidikan, selain itu mengadakan studi banding baik di daerah, wilayah maupun diluar Provinsi Kalimantan Timur pada sekolah yang dianggap sudah maju dan melakukan kerja sama dengan orang tua wali murid untuk memikirkan kemajuan sekolah.

l. Ekstrakurikuler

Adapun ekstrakurikuler SD Muhammadiyah Tenggara dari ekstrakurikuler keilmuan dan keimanan, kesenian, olah raga, keterampilan, mutu lingkungan, teknologi robotik dll, lebih jelasnya di lampiran.

m. Program Pengembangan Pendidikan

Melihat anemo dari masyarakat kepercayaan terhadap SD Muhammadiyah Tenggara dari tahun ketahun jumlah siswa semakin meningkat perlu penambahan dan persiapan program-program sekolah

untuk menjawab kepercayaan orang tua, perkembangan pendidikan maupun tantangan kedepan keperluan pendidikan yang yang berkualitas sesuai tuntutan dunia lapangan pekerjaan atau kesiapan menghadapi era globalisasi pasar bebas serta persaingan pendidikan yang sangat ketat. Untuk itu diperlukan program sekolah jangka pendek (program tahunan), Program jangka menengah (empat tahun), dan program jangka panjang (delapan tahun).

3. Madrasah Ibtidaiyah Asy Syauqi (MI Asy Syauqi)

Madrasah Ibtidaiyah Asy Syauqi merupakan satu-satunya madrasah ibtidayah yang terletak ditengah-tengah pusat Ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara tepatnya di Jalan Betutu No. 01 RT. 43 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong. Kehadiran Madrasah Ibtidayah sendiri ialah sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat sekitar sebagai obat kerinduan akan lembaga pendidikan yang berbasis Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Al – Qur'an.

a. Sejarah Singkat MI Asy Syauqi

MI Asyauki berdiri pada 3 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 081 Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kementrian Agama yaitu Bapak H. Djamaluddin, HD. Diprakarsai oleh usulan-usulan warga sekitar agar anak-anak bisa lebih mendalami ilmu Agama Islam, dan Tahfidzul Qur'an maka mulailah Madrasah Ibtidaiyah Asy Syauqi menjalankan proses belajar mengajar dengan jumlah murid

yang minim yaitu 6 orang murid. Serta minimnya fasilitas yang ada hingga proses mengajar pada awal tahun ajaran dilaksanakan di garasi kediaman Ketua Yayasan Asy Syauqi.

Namun seiring berjalannya waktu Madrasah Ibtidayah Asy Syauqi terus berbenah diri dan berkembang hingga pada tahun ajaran 2015/2016 jumlah murid berkembang pesat yaitu sebanyak 220 murid, dengan 9 ruang rombongan belajar (rombel) yang semua proses pembangunannya dengan pendanaan mandiri.

Madrasah Ibtidayah Asy Syauqi adalah sebuah lembaga penyelenggaraan kegiatan pendidikan dimana salah satu tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan ini meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan dasar, dan tujuan yang disesuaikan dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, serta satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan, memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

Pengembangan Madrasah Ibtidayah Asy Syauqi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian Pendidikan. Empat standar dari delapan Standar Nasional Pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan

Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Penilaian Pendidikan dan Standar Proses merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Hal ini pun dilakukan Madrasah Ibtidaiyah Asy Syauqi Tahun Pelajaran 2015/2016.

Pengembangan Madrasah Ibtidaiyah Asy Syauqi Tenggaraong didasarkan pada analisis konteks tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Hasil analisis tersebut tergambar dalam uraian berikut.

Madrasah Ibtidaiyah Asy Syauqi Tenggaraong berada di RT 43 No. 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggaraong, yang secara geografis terletak di ditengah Kota Tenggaraong.

Peluang Madrasah Ibtidaiyah Asy Syauqi Tenggaraong dalam mengembangkan madrasah adalah :

- 1) Perhatian Pemda terhadap pembiayaan pendidikan memadai;
 - 2) Perhatian Kementerian Agama dalam pengembangan madrasah
 - 3) Masyarakat sekitar memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban madrasah;
 - 4) Terdapat forum KKG, dan KKKS
 - 5) Sebagai madrasah yang setara dengan SD satu-satunya berada ditengah kota tenggarong
 - 6) Suasana lingkungan yang relatif kondusif dan agamis.
- b. Tujuan Pengembangan MI Asy Syauqi Tenggaraong

Madrasah Ibtidaiyah Asy Syauqi Tenggarong sebagai penyelenggaraan kegiatan pendidikan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar hal-hal berikut:

- 1) Menyelaraskan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
- 2) Memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menjunjung kelestarian keragaman budaya dan karakter bangsa
- 3) Memperhatikan pengembangan keragaman potensi, minat, kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan karakteristik peserta didik secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya
- 4) Meningkatkan toleransi dan kerukunan umat beragama dan memperhatikan norma agama yang berlaku di lingkungan madrasah
- 5) Mengoptimalkan pembelajaran berkeadilan untuk mendorong tumbuh kembangnya kesetaraan gender.

c. Visi dan Misi MI Asy Syauqi Tenggarong

Dengan mengacu pada rencana pengembangan tersebut maka MI Asy Syauqi memiliki Visi dan Misi. Adapun visi dan misi MI Asy Syauqi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Visi MI Asy Syauqi Tenggarong

Dalam merumuskan visi, pihak-pihak yang terkait (*stakeholders*) bermusyawarah, sehingga visi madrasah mewakili aspirasi berbagai kelompok yang terkait, dan seluruh kelompok yang terkait (guru, karyawan/Tata Usaha, peserta didik, orang tua, Komite/masyarakat,

pemerintah yang diwakili pengawas madrasah) bersama-sama berperan aktif untuk mewujudkannya.

Berikut ini merupakan visi yang dirumuskan oleh madrasah kami:

Visi ini menjiwai warga madrasah untuk selalu mewujudkannya setiap saat dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan madrasah. Visi tersebut mencerminkan profil dan cita-cita madrasah yang tergambar pada uraian berikut: *“Menjadi Madrasah Unggul, berprestasi, Berwawasan Global berazaskan Tuntunan Ajaran islam Ahlussunnah Wal Jamaah.”*

2) Misi MI Asy Syauqi Tenggarong

Untuk mencapai visi, perlu dirumuskan misi yang berupa kegiatan jangka panjang dengan arah yang jelas. Berikut ini merupakan misi yang dirumuskan berdasarkan visi tersebut.

- a) Menyelenggarakan pendidikan berdasarkan kurikulum Diknas ,
kementerian Agama dan Lokal
- b) Menyelenggarakan Pembinaan Iman dan Taqwa berdasarkan agama
Islam
- c) Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dengan pendekatan
pembelajaran dan manajemen bermutu
- d) Mendidik anak Berbudi pekerti luhur
- d. Tujuan MI Asy Syauqi Tenggarong

Tujuan yang ingin dicapai di MI Asy Syauqi Tenggarong secara bertahap akan dimonitoring, dievaluasi, dan dikendalikan setiap kurun waktu 1 (satu) tahun. Tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Tercapainya tingkat kelulusan 100% dengan rata-rata nilai 7,00
- 2) Meningkatnya persentase lulusan yang diterima di sekolah Lanjutan Tingkat pertama sekurang-kurangnya 80 % dari lulusan;
- 3) Tersedianya media pembelajaran standar yang diperlukan;
- 4) Meningkatnya kemampuan berbahasa Inggris, menulis artikel/kording dalam bahasa Indonesia, Matematika, IPA sehingga mempersiapkan berbagai kompetisi tingkat kabupaten dan provinsi;
- 5) Terlaksananya progam 3S (Senyum, Salam, Sapa);
- 6) Terlaksananya program 7K (Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kebersihan, Kenyamanan, Kerindangan, Kekeluargaan) sehingga madrasah menjadi kondusif;
- 7) Terlaksananya pelayanan yang optimal kepada semua pihak yang memerlukan berdasarkan SAM (Sistem Administrasi Madrasah);
- 8) Tercapainya siswa muslim 100% lancar baca tulis Al Qur'an dan 25% menguasai seni baca Al Qur'an,
- 9) Terlaksananya program berbagai kegiatan keagamaan seperti: Bimbingan baca tulis Al-Quran, Pesantren Kilat/Ramadhan, *retreat* dan peringatan hari besar keagamaan;
- 10) Terjalannya kerja sama antar warga/keluarga besar madrasah dan lingkungan sekitar ;
- 11) Membantu tujuan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
- 12) Membantu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berakhlakul karimah

- 13) Menyiapkan generasi muslim yang utuh , beriman, bertaqwa, berilmu dan beramal nyata dalam seluruh aspek kehidupan.
- 14) Menyiapkan siswa menjadi generasi unggul yang sehat, kuat cerdas, terampil serta cinta tanah air

e. Landasan Pengembangan MI Asy Syauqi Tenggarong

Landasan pengembangan MI Asy Syauqi terdiri atas:

- 1) Undang-undang Dasar 1945;
- 2) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas);
- 3) PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Permendiknas RI No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5) Permendiknas RI No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6) Permendiknas RI No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permen 22 dan 23 dan No. 6 Tahun 2007 tentang perubahan Permendiknas No. 24;
- 7) Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian;
- 8) Permendiknas RI No. 24 Tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana;
- 9) Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
- 10) PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan;
- 11) Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional;

d. Alolasi Waktu Pembelajaran MI Asy Syauqi Tenggara

Alokasi Waktu Pembelajaran MI Asy Syauqi Tenggara sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Alokasi Waktu Pembelajaran MI Asy Syauqi

Komponen	Alokasi Waktu						Jumlah
	I	II	III	IV	V	VI	
1. Mata Pelajaran							
a. Pendidikan Agama Islam							
1) Al Qur'an Hadits	2	2	3	3	3	3	16
2) Aqidah Akhlak	2	2	2	2	2	2	12
3) Fiqih	2	2	3	3	3	3	16
4) Sejarah Kebudayaan Islam			2	2	2	2	8
5) Bahasa Arab	2	2	2	3	3	3	15
b. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2	2	2	2	12
c. Bahasa Indonesia	6	6	6	6	6	6	36
d. Matematika	6	6	6	6	6	6	36
e. Ilmu Pengetahuan Alam	3	3	4	5	5	5	25
f. Ilmu Pengetahuan Sosial	3	3	3	5	5	5	24
g. Seni Budaya dan Keterampilan	2	2	2	2	2	2	12
h. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan	4	4	4	4	4	4	24
2. Muatan Lokal							
a. Bahasa Inggris	2	2	2	2	2	2	12
b. KeNUan				2	2	2	6
c. Tahfidzul Qur'an	2	2	2	2	2	2	12
Jumlah	37	38	41	48	48	48	266

Sumber: TU Asy Syauqi Tenggara, data diolah.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka peneliti akan mendeskripsikan data mengenai manajemen pembiayaan pendidikan yang meliputi proses penyusunan penganggaran pembiayaan sekolah,

penggunaan pembiayaan sekolah, pengawasan pembiayaan sekolah serta pertanggungjawaban pembiayaan sekolah di SD IT Nurul Ilmi Tenggarong, SD Muhammadiyah Tenggarong, MI Asy Syauqi Tenggarong kabupaten Kutai Kartanegara.

1. Proses Penyusunan Perencanaan Anggaran Pembiayaan

Dalam proses perencanaan anggaran sekolah yang lebih dikenal dengan bagaimana tahapan dalam pembuatan RAPBS pada lembaga sekolah swasta khususnya yaitu dalam perencanaan sumber pendapatan dan pengelolaan dana yang didapatkan untuk biaya pendidikan yang terencana sesuai kebutuhan operasional pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dari masing-masing lembaga pendidikan. oleh karena itu dibawah ini adalah gambaran dari tiga lembaga sekolah dasar swasta sebagai lokasi penelitian di dalam manajemen proses penyusunan perencanaan anggaran pembiayaan sekolah sebagai berikut:

a. SDIT Nurul Ilmi Tenggarong

Sumber dana dari SD IT Tenggarong yaitu dari infaq wajib setiap bulan sebagai wujud dari komitmen orang tua untuk dididik anaknya dan proses penyusunan perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam pembiayaan, tanpa proses tersebut maka dapat dipastikan sasaran yang akan dicapai biasanya jauh dari apa yang menjadi target dalam mencapai tujuan pendidikan, dengan proses penyusunan perencanaan pembiayaan dapat mengembangkan bagaimana sumber pembiayaan itu dapat diperoleh, kemana penggunaan dan bagaimana mempertanggungjawabkan pembiayaan

tersebut. SDIT Nurul Ilmi Tenggarong menjalankan tahapan penganggaran mulai dari bagaimana mendapatkan sumber pembiayaan:

“Untuk sumber dana dari SDIT Nurul Ilmi yang pertama dari infaq wajib siswa setiap bulan sebagai wujud dari komitmen orang tua untuk di didik anaknya, ada juga namanya infaq jariyah itu sekali dalam 6 tahun, kemudian infaq wajib itu sekali sebulan. Sumber kedua dari pemerintah, jadi kita masih bisa dapat bantuan dana dari pemerintah yaitu dalam hal ini bosnas dan boskab tapi boskab tahun ini lagi tidak ada karena daerah devisa, tapi tidak membuat sekolah terhenti kegiatannya atau tidak terlalu berpengaruh terhadap kegiatan sekolah karena itu hanya untuk pendukung perbaikan sekolah”⁴

Senada dengan wakil kepala sekolah SD IT Nurul Ilmi Tenggarong juga menjelaskan:

“Sumber pembiayaan itu memang ada dari beberapa sumber dari keluarga besar sendiri, kemudian dari sumbangan wali murid dengan persetujuan komite dan selanjutnya ada dana-dana dari pemerintah itu sendiri yang disampaikan kepada kami berupa fisik maupun berupa dana bosnas maupun boskab, tapi itu tidak terlalu besar, yang besar adalah melalui keluarga besar dan partisipasi orang tua siswa”.⁵

Begitu juga dengan penjelasan bendahara sekolah SD IT Nurul Ilmi terkait sumber pembiayaan sekolah sebagai berikut:

Untuk sumber pembiayaan dari SDIT yang pertama dari wali murid dalam hal ini orang tua yang sekolahkan anaknya di SDIT kita tidak bisa menafikkan mereka memiliki kontribusi besar buat kita buat keberlangsungan SDIT itu sendiri, yang kedua dari pemerintah daerah dalam hal ini yang diwakili oleh dinas pendidikan kabupaten kutai kartanegara dalam program dana Boskab dan dari pemerintah pusat yaitu dana Bosnas.⁶

⁴Ahmad Zainuddin, Kepala SD IT Nurul Ilmi Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 23 April 2016.

⁵Akhid Purwanto, Wakil Kepala Sekolah SD IT Nurul Ilmi Tenggarong, wawancara di ruang kepala Sekolah, Tanggal 23 April 2016

⁶Daryanti, Bendahara Sekolah SD IT Nurul Ilmi Tenggarong, wawancara di ruang bendahara sekolah tanggal 24 april 2016.

Terkait tentang kapan mulai proses penganggaran, kepala sekolah SD IT Nurul Ilmi Tenggarong menjelaskan sebagai berikut:

“Kami disini punya tim, bisa dikatakan tim sukses bertemu setiap sekali seminggu dan kita merumuskan segala sesuatu, adapun penganggaran secara global dimulai setiap mendekati tahun ajaran baru sekitar bulan Juni”.⁷

Proses penganggaran di SD IT Nurul Ilmi Tenggarong memiliki beberapa tahapan sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa pejabat SD IT Nurul Ilmi Tenggarong sebagai berikut:

“Kalau penyusunan RKS itu kita buat sesuai dengan yang diberlakukan oleh pemerintah, kalau dana boskab maka kita mengacu pada bagaimana penggunaan dana bos untuk penyalurannya, penyusunan dan lain sebagainya, jadi kita sesuaikan dengan jubnisnya, yang jubnisnya tiap tahun berbeda-beda tapi berbeda-beda tidak terlalu signifikan, kemudian untuk penyusunannya kami disini punya tim, ya bisa dikatakan tim suksesnyalah itu bertemu setiap sekali seminggu, dan kita merumuskan setiap kegiatan-kegiatan termasuk penggodokan RKAS, RAPBS dan lain sebagainya jadi di tim itu kita godok disitu setelah itu baru kita masukkan ke rapat besar, rapat besar itu semua guru tahu, ini pengeluaran-pengeluaran, ini dana-dana jadi mulai sejak beberapa tahun ini kita itu transparan dengan pendapatan keuangan serta pengeluarannya termasuk SPJ-SPJ nya bahkan alhamdulillah kita sangat terbantu segala kegiatan kalau disini semua terdokumentasi dan semua sudah diatur jadi untuk laporan keuangan, serta segala penyusunan untuk tahun depan itu sudah tidak terlalu bermasalah”.⁸

Adapun penjelasan wakil kepala Sekolah sebagai berikut:

“Yah biasanya kita ini ada menyusun RAPBS setiap tahun itu dari pihak yayasan dan pihak sekolah sendiri, dan dari komite sekolah dan juga melibatkan koordinator dan dewan guru yang semua itu punya

⁷Ahmad Zainuddin, Kepala SD IT Nurul Ilmi Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 23 April 2016.

⁸Ahmad Zainuddin, Kepala SD IT Nurul Ilmi Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 23 April 2016.

tahapan-tahapan yang semua kebutuhan dituangkan dalam RAPBS tersebut biasanya di awal tahun ajaran baru kemudian terus dipantau perkembangannya beserta pemanfaatannya”⁹

Dalam semua proses diatas, kepala sekolah SD IT Nurul Ilmi Tenggarong menegaskan bahwa yang terlibat dalam penyusunan anggaran sekolah sebagai berikut:

“Tentunya semua pihak ya, termasuk itu tadi, mulai dari tim sekolah, kepala sekolah, bendahara, pengurus intinya, kita rekap secara global, kita bahas lebih detail lagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing koordinator, setelah itu kita bahas lagi dengan guru-guru sesuai kebutuhan guru, kalau tidak perlu kita keluarkan begitu seterusnya dengan melihat anggaran yang sudah kita rapatkan kan ada pagu istilahnya yang sudah diputuskan. Kemudian untuk Sumbangan Wajib Ifaq yayasan itu hampir semua itu untuk gaji guru, jadi gaji guru gambaran setiap bulannya itu sekitar 150 juta per bulannya. Kalau dihitung dari satu tahun itu lebih dari 1 setengah milyar.”¹⁰

Dalam penyusunan anggaran sekolah, bukan hanya dari pihak kepala sekolah dan jajarannya saja yang terlibat tetapi lebih dari itu orang tua siswa yang diwakili oleh komite sekolah dan jajarannya juga ikut dilibatkan sebagaimana bendahara Sekolah SD IT Nurul Ilmi Tenggarong menjelaskan:

“Untuk yang terlibat dalam pembuatan RAPBS adalah yang pertama adalah kepala sekolah, kemudian para koordinator-koordinator yang menjadi bagian dari sekolah tersebut ada koordinator kesiswaan, kurikulum, humas, kemudian sarana prasarana, dan yang paling penting adalah yang terlibat adalah bendahara sekolah juga yang terlibat adalah dari para guru-guru baik guru kelas maupun guru bidang

⁹Akhid Purwanto, Wakil Kepala Sekolah SD IT Nurul Ilmi Tenggarong, wawancara di ruang kepala Sekolah, Tanggal 23 April 2016.

¹⁰Ahmad Zainuddin, Kepala SD IT Nurul Ilmi Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 23 April 2016.

studi dan juga dari pihak independen dari perwakilan orang tua siswa yaitu dari pihak komite sekolah”¹¹

Adapun kendala dalam penyusunan anggaran pembiayaan SDIT sebagaimana penjelasan kepala sekolah sebagai berikut:

“Masalah kendala tentu kita tidak pernah luput dari kendala apa lagi dalam salah keuangan terutama yang berasal dari pemerintah ya, kendalanya itu terkadang laporan data dapodik telat itu berpengaruh, kemudian kita sudah buat RKAS nya nih RAPBS nya kita sudah buat dengan sangat rapi tapi nanti ada kebutuhan-kebutuhan mendadak yang sifatnya sangat urgen dan itu harus kita danai, bahkan sebelumnya kita sudah prediksi ini sudah tidak usah lagi, itu yang menjadi kendala buat kami dan mau tidak mau harus merubah RKS sesuai dengan pengeluaran atau bisa disebut RKS perubahan dan itu tidak ada masalah sudah ada aturan terkait hal itu”¹².

Berdasarkan data penelitian dilapangan sebagaimana dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyusunan anggaran sekolah terkait tentang pembiayaan penyelenggaraan biaya pendidikan di sekolah SDIT Nurul Ilmi Tenggarong dilaksanakan sejak awal tahun pelajaran sekitar mulai bulan Juni. Sekolah membentuk tim sukses penyusunan anggaran yang terdiri dari tim inti yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan bendahara kemudian dibantu oleh beberapa koordinator masing-masing kepala bidang. Tim penyusun RKAS mengagendakan beberapa kali rapat kecil sampe kepada rapat besar untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan pembiayaan dari masing-masing *stakeholder*.

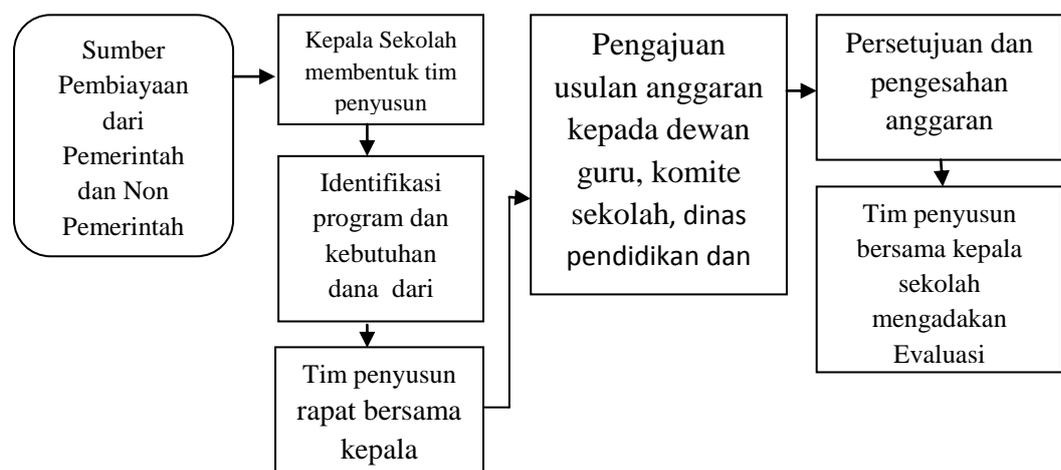
¹¹Daryanti, Bendahara Sekolah SD IT Nurul Ilmi Tenggarong, wawancara di ruang bendahara sekolah tanggal 24 april 2016.

¹²Ahmad Zainuddin, Kepala SD IT Nurul Ilmi Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 23 April 2016.

Informasi dan data yang diperoleh kemudian dikaji dalam rapat analisis pembiayaan mana yang menjadi kebutuhan prioritas dan mana yang masih bisa ditunda, bahkan ada juga yang dihapus karena sudah tidak dibutuhkan lagi dan pada akhirnya semua masukan dari masing-masing stakeholder sekolah tersebut sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKAS. Tim penyusun membuat estimasi dana dan rancangan RKAS berdasarkan format yang telah disediakan Dinas Pendidikan jika itu terkait sumber pembiayaan dari pemerintah seperti bosnas dan boskab. Hasil rancangan RKAS tersebut dikoordinasikan dengan kepala sekolah serta disampaikan kepada dewan guru dan komite sekolah untuk mendapat saran dan persetujuan. Kemudian, sekolah mengajukan RKAS tersebut ke dinas Pendidikan untuk mendapat pengesahan dan yayasan untuk mendapat pengesahan dari sumber pembiayaan non pemerintah.

Sebagai gambaran dari alur proses penganggaran pembiayaan pendidikan di SD IT Nurul Ilmi Tenggarong sebagai berikut:

Gambar 4.1 Skema Alur Proses Penyusunan Penganggaran di SDIT Nurul Ilmi Tenggarong



Dari gambar 4.1 diatas dapat dilihat bagaimana SDIT Nurul Ilmi Tenggarong dalam proses perencanaan anggaran sekolah. Setidaknya sudah menggunakan perinsip dari manajemen pembiayaan secara sistematis dan prosedural. Ini menandakan bahwa SDIT Nurul Ilmi Tenggarong memiliki kompetensi dalam melaksanakan proses penyusunan anggaran pembiayaan sekolah. jika dilihat bahwa kepala sekolahlah yang memiliki peran yang signifikan dalam membawa tujuan dari institusi. Kepala sekolah memiliki peranan yang sangat strategis untuk membuat sekolah itu maju.

Adapun rekafitulasi rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) tahun Pelajaran 2016 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Rekafitulasi RKAS SDIT Nurul Ilmi Tenggarong

No.	Penerimaan	Jumlah (Rp)	No	Pengeluaran	Jumlah (Rp)
1.	BOSKAB	255.072.000	1.	Belanja Pegawai	1.690.420.000
2.	BOSNAS	591.200.000	2.	Belanja Barang dan Jasa	708.899.000
3.	YAYASAN	2.429.600.000	3.	Belanja Modal	375.772.000
Jumlah		3.275.872.000	Jumlah		2.775.091.000

Sumber: RKAS SDIT Nurul Ilmi Tahun 2016, data diolah.

Berdasarkan tabel diatas, bahwa sumber pembiayaan pendidikan SDIT Nurul Ilmi Tenggarong tahun ajaran 2016 bersumber dari BOSKAB sebesar 255,072,000, sedangkan BOSNAS sebesar 591,200,000 dan dana yang bersumber dari Yayasan berupa pemasukan dari infaq wajib siswa

(SPP) sejumlah 2,429,600,000. Dengan demikian 8% biaya operasional sekolah sumber pembiayaan berasal dari BOSKAB, 18% berasal dari BOSNAS dan 74 % berasal dari dana yayasan. Hal tersebut menunjukkan peran yayasan sangat besar dalam menunjang pelaksanaan pendidikan. adapun sumbangan biaya gedung per 6 tahun oleh siswa itu langsung dikelola oleh yayasan untuk menunjang pembangunan gedung sekolah.

b. SD Muhammadiyah Tenggarong

Sumber pembiayaan pendidikan di SD Muhammadiyah Tenggarong bertunpu pada beberapa sumber yaitu dari pemerintah dan non pemerintah, adapun dari pemerintah biasanya bantuan berupa BOSKAB, BOSDA, dan BOSNAS. Kemudian sumber dari non pemerintah meliputi Sumbangan Wajib Siswa (SPP) dan beberapa sumber lainnya yang halal dan tidak mengikat sebagaimana penjelasan dari hasil wawancara berikut ini:

“Untuk pembiayaan SD Muhammadiyah tenggarong ini memang ada beberapa sumber, yang pertama dari pemerintah seperti dana Bosnas, dana Boskab dan Bosda, kemudian yang kedua dari orang tua siswa yang berbentuk SPP, termasuk infaq yang tidak mengikat dari siswa dan wali siswa juga ada kalau kita diawal penerimaan siswa baru ada namanya uang infak untuk pembangunan, dari sumber-sumber itulah yang untuk pembiayaan sekolah.”¹³

Senada dengan apa yang disampaikan wakil Kepala Sekolah bahwa sumber pembiayaan SD Muhammadiyah Tenggarong yaitu:

“Untuk sumber pembiayaan SD Muhammadiyah Tenggarong ada tiga sumber yang pertama dari sumber SPP yang diambil dari siswa dan nominalnya bervariasi sesuai dengan pilihan orang tua siswa mulai dari

¹³Hariyadi, Kepala SD Muhammadiyah Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 23 April 2016.

200.000, 250.000 s/d 300.000, tanpa kriteria kemampuan orang tua siswa. Mereka bebas memilih sesuai kemampuan masing masing dari 3 niminal tersebut. kemudian yang kedua dari Boskab dan ketiga dari Bosnas. Kemudian dari sumber yang lain itu dari koperasi sekolah, tapi itu tidak dimasukkan ke RKA sekolah, itu hanya untuk membantu operasional sekolah yang bersifat tidak ada dalam perencanaan.¹⁴

Adapun keterangan dari bendahara sekolah terkait sumber pembiayaan sebagai berikut:

“Sumber pembiayaan di SD Muhammadiyah itu pertama dari SPP siswa, yang kedua dari Boskab, ketiga dari Bosnas dan yang terakhir dari donatur baik dari wali siswa atau dari lainnya yang bersifat halal dan tidak mengikat”¹⁵

Dari keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber pembiayaan SD Muhammadiyah Tenggarong yang rutin dan pasti didapatkan dari tiga sumber, yaitu pertama dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), ini merupakan sumbangan wajib siswa rutin tiap bulan sebagaimana besaran iuran telah ditentukan sekolah mulai dari 200.000, 250.000 s/d 300.000, dan sumbangan pembangunan yang didapatkan hanya sekali dalam satu angkatan tahun pelajaran baru. kemudian yang kedua dari BOS Kab. Atau bantuan operasional sekolah yang bersumber dari pemerintah kabupaten dalam hal ini adalah dari pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara yang disalurkan langsung ke rekening sekolah setelah melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak

¹⁴Dardiri, Wakil Kepala SD Muhammadiyah Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 28 April 2016.

¹⁵ Nur Rahmadani, Bendahara Sekolah SD Muhammadiyah Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 25 April 2016.

pemerintah Kabupaten. Dan terakhir dari BOSNAS, yaitu bantuan operasional sekolah yang bersumber dari pemerintah pusat yang dicairkan sesuai ketentuan dan perundang-undang yang berlaku. Adapun sumber dari donatur atau bantuan lain yang halal dan tidak mengikat bersifat tidak pasti dan tidak bisa diukur, yang jelas ada namun tidak rutin didapatkan pihak sekolah.

Adapun proses penganggaran pembiayaan di SD Muhammadiyah Tenggarong sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Untuk perencanaan kita ini memang sekolah pada setiap akhir semester genap sebelum liburan kita sudah adakan rapat pembahasan anggaran sekolah, maksudnya adalah supaya ketika tahun ajaran baru semua sudah siap tinggal dilaksanakan. yang kita bahasa ada tiga, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kalau jangka pendeknya ini untuk pembiayaan dalam jangka satu tahun sekolah itu memerlukan beberapa pengeluaran yang sudah ada yang kita gunakan sesuai anggaran jangka pendeknya yaitu satu tahun, ada lagi yang dua tahun mungkin jangka panjangnya, jangka panjang untuk pembiayaan dalam rangka pembangunan, jangka panjang mungkin akan membuka sekolah yang lain”.¹⁶

Dalam prosesnya SD Muhammadiyah memulai tahapan sebagai berikut:

“Kalau penyusunan anggaran memang terutama di SD Muhammadiyah memang ada beberapa tahapan ini yang pertama kita harus ada rapat intern sekolah dulu dengan bidang-bidang apa keperluan dari bidang-bidang itu setelah itu disampaikan kepada rapat pada yayasan yaitu pimpinan daerah juga tidak lupa dengan komite sekolah. Jadi anggaran-anggaran itu sudah tersusun rapi sehingga dalam waktu yang kita gunakan satu tahun pada awal tahun ajaran kita sudah sudah siap untuk anggaran-anggaran tahun ajaran berikutnya”.¹⁷

¹⁶Hariyadi, Kepala SD Muhammadiyah Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 23 April 2016.

¹⁷Hariyadi, Kepala SD Muhammadiyah Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 23 April 2016.

Ditambah keterangan dari wakil kepala Sekolah SD

Muhammadiyah tenggarong mengatakan:

“Penyusunan anggaran paling sedikit itu 3 tahap, tahap pertama itu dari pihak sekolah jadi kepala sekolah beserta wakilnya dan kepala kepala bidang itu mengadakan rapat awal itu pertama menentukan sumber pendapatan kita karena jumlah siswa kita sudah falid, kemudian juga pemilihan SPP untuk siswa baru juga sudah falid baru kita susun dalam rapat awal intern sekolah, setelah itu baru rapat kedua, itu kita bawa rab kita itu dengan majlis Dikdasmen pimpinan Daerah Muhammadiyah Kukar, na disitu terjadi tarik ulur karena dari pihak Dikdasmen banyak mungkin yang belum diketahui anggaran-anggaran yang diperlukan oleh sekolah tapi dengan argumen yang disampaikan karena penyusunannya dari awal insya Allah sudah memenuhi apa yang direkomendasikan sekolah, kemudian rapat yang ketiga tinggal pengesahan dari majlis Dikdasmen, setelah itu tinggal direalisasikan kemudian dari pihak independen yang dilibatkan dari pihak komite tapi tidak sampai pada rapat dengan Dikdasmen hanya pada awal rapat penentuan kebutuhan sekolah saja”¹⁸

Kemudian yang terlibat dalam proses penyusunan tersebut sebagaimana keterangan bendahara sekolah sebagai berikut:

“Yang pertama Kepala Sekolah dan seluruh petugas administrasi termasuk bendahara sekolah, yang kedua seluruh yang terkait dengan pendidikan didalamnya ada komite sekolah, guru, bidang-bidang yang membantu kegiatan operasional dan terakhir dari unsur yayasan yaitu pimpinan daerah Muhammadiyah”.¹⁹

Adapun hambatan dalam proses penyusunan anggaran SD Muhammadiyah Tenggarong sebagai mana penjelasan kepala sekolah sebagai berikut:

“Jadi selama ini untuk rapat anggaran itu tidak pernah di SD Muhammadiyah itu ada kendala yang terlalu berarti, tidak ada kendala bahkan selama ini lancar-lancar aja karena kita di Muhammadiyah ini untuk penyusunan rab ini sudah serba transparan secara yah kita secara

¹⁸Dardiri, Wakil Kepala SD Muhammadiyah Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 28 April 2016.

¹⁹ Nur Rahmadani, Bendahara Sekolah SD Muhammadiyah Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 25 April 2016.

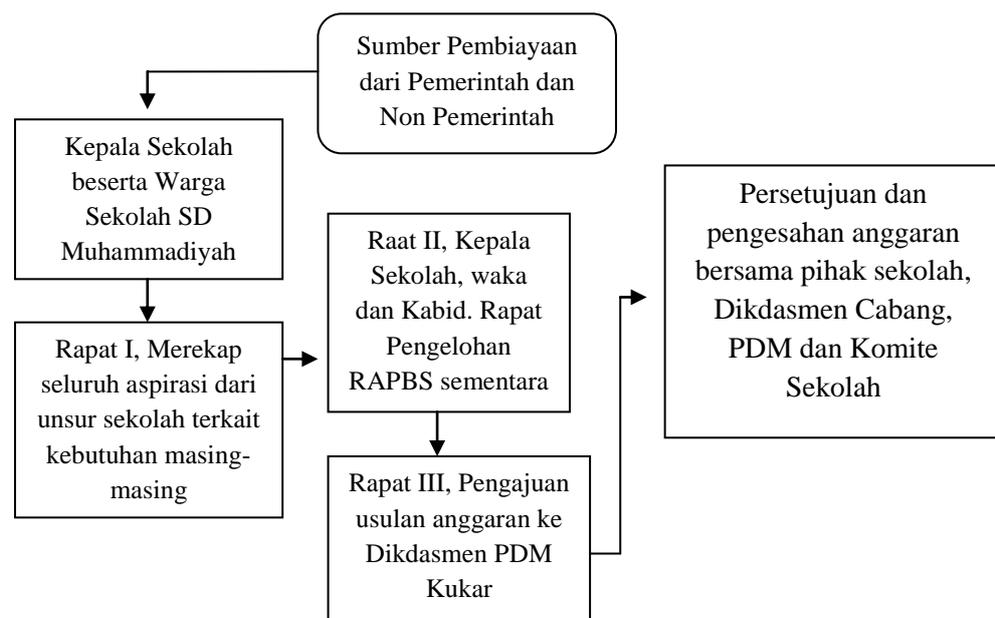
kekeluargaan dan tidak ada rasa ya masing masing ego itu tidak ada. Yang jelas untuk keputusan anggaran kita sesuai dengan anggaran yang ada secara transparan”.²⁰

Wakil kepala sekolah SD Muhammadiyah Tenggara menambahkan bahwa terkait kendala dalam proses penyusunan anggaran sebagai berikut:

“Kendala biasanya terkadang itu kita mengalami pada BOSKAB dan BOSNAS, itu kendalanya kadang-kadang tahunnya sudah berjalan, triwulannya sudah berjalan itu dananya belum cair, jadi disitu kendala yang sering dialami, na untuk menanggulangi terpaksa sekolah mencari jalan keluar, apapun yang ditempuh untuk memenuhi kendala tersebut, itu kan nanti semacam subsidi silang. Kendalanya disitu pak”.²¹

Dari gambaran diatas, alur proses penganggaran pembiayaan pendidikan dapat digambarkan sebagaimana sekema berikut ini:

Gambar 4.2 Skema Alur Proses Penyusunan Penganggaran di SD Muhammadiyah Tenggara.



²⁰Hariyadi, Kepala SD Muhammadiyah Tenggara, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 23 April 2016.

²¹Dardiri, Wakil Kepala SD Muhammadiyah Tenggara, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 28 April 2016.

Dari hasil wawancara dan gambar 4.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyusunan anggaran sekolah di SD Muhammadiyah Tenggarong setidaknya melibatkan beberapa unsur stakeholder SD Muhammadiyah diantaranya dari pihak sekolah, pimpinan Dikdasmen daerah Muhammadiyah Kukar, dan komite sekolah.

Dalam prosesnya sebagaimana keterangan diatas berlangsung dalam empat tahapan, yaitu tahap pertama adalah rapat yang diselenggarakan pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah beserta jajarannya untuk dengar pendapat, dengar aspirasi seluruh kebutuhan warga sekolah yang kesemuanya direkap di masing masing bidang dan kepentingan guru bidang studi dan wali kelas. Kemudian rapat kedua hanya menghadirkan kepala sekolah, wakil, dan kepala bidang yang membahas tentang darimana sumber pembiayaan didapatkan dan mana yang menjadi skala prioritas kemudian diolah menjadi sebuah rancangan RAPBS sementara pembiayaan selama satu tahun untuk diajukan dalam rapat tahap ketiga. Rapat ketiga antara lain hanya melibatkan kepala sekolah, waka, dan bendahara sekolah bersama pihak dari Dikdasmen PDM Kukar untuk menyamakan persepsi tentang kebutuhan sekolah pada tahun tersebut. selanjutnya ketika semua sudah tidak ada masalah semua sudah sepakat, barulah diadakan rapat keempat yaitu pengesahan RAPBS oleh dikdasmen dan dihadiri oleh beberapa unsur pimpinan daerah Muhammadiyah dan dari pihak Komite Sekolah.

Adapun rekafitulasi rencana kegiatan anggaran sekolah SD Muhammadiyah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5 Rekafitulasi RKAS SD Muhammadiyah Tenggara

No.	Penerimaan	Jumlah (Rp)	No	Pengeluaran	Jumlah (Rp)
1.	BOSKAB	431.600.000	1.	Belanja Pegawai	2.068.891.280
2.	BOSNAS	877.000.000	2.	Belanja Barang dan Jasa	1.085.021.120
3.	YAYASAN	2.857.450.000	3.	Belanja Modal	437.642.000
Jumlah		4.166.050.000	Jumlah		3.176.796.680

Sumber: RKAS SD Muhammadiyah Tahun 2016, data diolah.

Berdasarkan tabel diatas, bahwa sumber pembiayaan pendidikan SD Muhammadiyah Tenggara tahun ajaran 2016 bersumber dari BOSKAB sebesar 431.600.000, sedangkan BOSNAS sebesar 877.000.000 dan dana yang bersumber dari Yayasan berupa pemasukan dari infaq wajib siswa (SPP) sejumlah 2.857.450.000. Jika dipersentasekan, maka 10% sumber pembiayaan operasional sekolah dari BOSKAB, 21% dari BOSNAS dan 69% dari subsidi yayasan yang bersumber dari dana SPP siswa. Adapun saldo yang bersumber dari dana SPP siswa dikelola oleh yayasan untuk pengembangan sekolah dan subsidi silang bagi sekolah yang baru merintis.

c. MI As-Syauki Tenggarong

Madrasah Itbtida'iyah Asy Syauqi Tenggarong merupakan Sekolah yang baru meluluskan satu angkatan, artinya baru berjalan 6 tahun terakhir ini, namun dari perkembangan MI Asy Syauqi cukup dibilang dapat mengejar walau masih harus terus berjuang, ini dapat dilihat dari perkembangan sarana-prasarananya dan jumlah siswa yang semakin bertambah tiap tahun ajaran baru, namun jika bicara masalah manajemen pembiayaan memang masih banyak kekurangan dari segi proses dan tata kelola bersama yayasan karena keterbatasan tenaga dan biaya. Adapun sumber pembiayaan dalam hal ini MI Asy Syauqi masih bergantung pada bantuan pemerintah berupa BOSKAB dan BOSNAS kemudian dari Infaq wajib siswa yang masih terbilang relatif murah hanya berkisar Rp. 125.000,- perbulan, sementara iuran wajib pembangunan setiap tahun ajaran baru masih berkisar Rp. 1.000.000,- dengan jumlah siswa 215 siswa tahun pelajaran 2015/2016.

Berdasarkan hasil di lapangan, sumber pembiayaan MI Asy Syauqi Tenggarong sebagaimana hasil wawancara dengan kepala sekolah sebagai berikut:

“Untuk sumber pembiayaan MI Asy Syauqi yang pertama dari pemerintah berupa BOSKAB dan BOSNAS kemudian dibantu dari partisipasi siswa berupa Infaq wajib dan Infaq sukarela dari wali siswa. Besaran partisipasi siswa berupa Infaq wajib sebesar Rp. 125.000,- per bulan sementara untuk biaya infaq pembangunan untuk siswa baru dikenakan 1.000.000,- sekali dalam 6 tahun”²²

²² Iwan Hartono, Kepala MI Asy Syauqi Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 30 Maret 2016.

Dari paparan diatas bahwa dapat dilihat MI Asy Syauqi mendapat sumber pembiayaan dari Pemerintah dan non pemerintah sebagaimana penjelasan dari wakil kepala sekolah MI Asy Syauqi sebagai berikut:

“Kalau sumber pembiayann MI Asy Syauqi itu yang pertama dari non pemerintah berupa infaq wajib siswa karena pembiayaan, kami wajibkan siswa untuk mengeluarkan infaq wajib perbulannya untuk keperluan pembiayaan sekolah khususnya honorarium guru, terus ada lagi dari bantuan yayasan, kemudian dari pemerintah dalam hal ini yaitu melalui dinas pendidikan berupa BOSNAS dan BOSKAB untuk membantu operasional sekolah khususnya, itu saja sumber pembiayaan kami”.²³

Dari paparan wakil kepala sekolah diatas sangat jelas bahwa MI Asy Syauqi hanya mengandalkan dua sumber pembiayaan yaitu dari Pemerintah berupa Bosnas dan Boskab kemudian dari non pemerintah berupa Infaq wajib siswa perbulan dan Infaq Gedung yang dikelola oleh yayasan langsung.

Dari sumber pembiayaan di atas maka MI Asy Syauqi menerapkan beberapa tahapan dalam proses penyusunan anggaran RAPBS tiap tahun ajaran baru, sebagaimana hasil wawancara dibawah ini:

“Untuk proses penyusunan anggaran, yang pertama guru-guru itu dihimpun semuanya baru disitu di input seluruh keperluan guru bidang studi apa, keperluan wali kelas apa, kita rampungkan disitu, kita susun jadi satu kemudian dari usulan-usulan wali kelas, guru bidang studi itu baru kita pilah mana yang menjadi skala prioritas dan gak, baru ditentukan jumlah anggaran biaya sesuai dengan besaran jumlah dana yang kita terima khususnya untuk pembiayaan operasional sekolah. Kemudian kalau untuk penggajian guru itu tinggal ajukan ke yayasan karena dana SPP itu langsung dikelola oleh bendahara yayasan dan dikembalikan sepenuhnya untuk penggajian guru kecuali dana infaq

²³ Lilik Khairiyah, Wakil Kepala MI Asy Syauqi Tenggara, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 30 Maret 2016.

pembangunan itu langsung dikelola oleh yayasan untuk pembangunan”.²⁴

Demikian menurut pemaparan kepala sekolah tentang proses penganggaran di Asy Syauqi yang masih nampak sederhana, sebagaimana penjelasan dari wakil kepala sekolah juga sebagai berikut:

“Biasanya kami laksanakan rapat RKAS tiap tahun ajaran, jadi kita susun sedemikian rupa serinci-rincinya apa yang dibutuhkan apa yang menjadi keperluan pembiayaan sekolah dengan melibatkan seluruh guru bidang studi dan wali kelas, khususnya dalam memenuhi kebutuhan operasional sekolah melalui dana Bosnas dan Boskab dengan mengikuti Juklak dan Juknisnya, adapun masalah SPP dari infaq wajib siswa itu langsung di kelola yayasan dan penggajian guru langsung oleh yayasan”.²⁵

Adapun kendala dalam penyusunan anggaran di MI Asy Syauqi sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala sekolah sebagai berikut:

“Yang menjadi kendala itu hanya pada bagaimana mengelompokkan dana yang diterima itu, kalau kekurangan sih kita meyesuiakan saja, Cuma kadang-kadang dana itu yang lambat setelah kita susun dan ajukan biasanya tidak keluar pada waktu yang tepat khususnya pada dana Boskab Bosnas, kalau iuran siswa juga masih ada yang terlambat membayar”.²⁶

Wakil kepala sekolah juga menambahkan bahwa kendala dalam proses penyusunan anggaran di MI Asy Syauqi adalah:

“Kendalanya hanya di pelaporan misalnya dari dana Bosnas atau boskab itu kan punya tenggang waktu harus jadi, sementara tenaga kami terbatas untuk segera menyelesaikannya. Makanya itu terkadang jadi kendala karena bendahara disini hanya dua, dari bendahara sekolah

²⁴ Iwan Hartono, Kepala MI Asy Syauqi Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 30 Maret 2016.

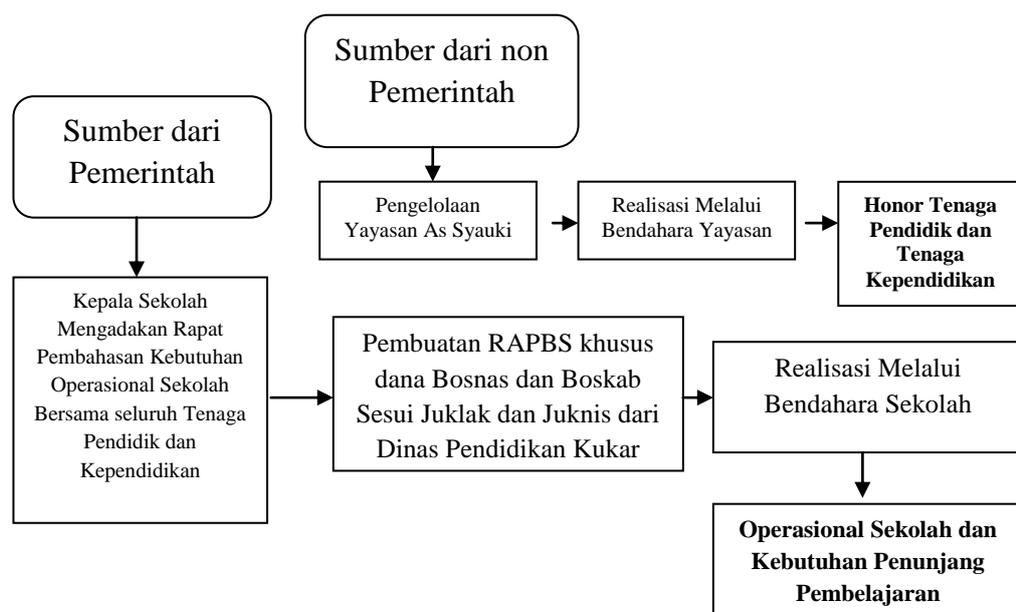
²⁵ Lilik Khairiyah, Wakil Kepala MI Asy Syauqi Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 30 Maret 2016.

²⁶ Iwan Hartono, Kepala MI Asy Syauqi Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 30 Maret 2016.

1 orang dan dari bendahara Bosnas Boskab 1 orang kalau SPP itu langsung ditangani bendahara yayasan”.²⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat disederhanakan dalam skema alur proses penyusunan penganggaran pembiayaan pendidikan MI Asy Syauqi sebagai berikut ini:

Gambar 4.3 Skema Alur Proses penyusunan penganggaran MI As Syauki Tenggara



Dengan demikian MI Asy Syauqi ada perbedaan dalam pengelolaan sumber pembiayaan dalam proses penyusunannya terpisah dengan yayasan, kalau dana dari pemerintah seperti Bosnas dan Boskab dikelola oleh sekolah, adapun dana yang diperoleh dari infaq wajib siswa dan sumbangan pembangunan siswa itu langsung di kelola dan di operasionalkan oleh yayasan melalui bendahara sekolah. jadi antara keuangan sekolah dan yayasan terpisah dan tidak dalam satu kesatuan

²⁷Lilik Khairiyah, Wakil Kepala MI Asy Syauqi Tenggara, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 30 Maret 2016.

perencanaan penganggaran pembiayaan pendidikan, artinya dalam yang RKAS Madrasah tidak terdapat perencanaan penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari non pemerintah. Urusan kompensasi maupun stimulan guru langsung ditangani oleh yayasan Asy Syauqi. Kepala sekolah hanya merencanakan penggunaan anggaran sekolah yang bersumber dari pemerintah yaitu BOSKAB dan BOSNAS.

Adapun rekapitulasi Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) MI Asy Syauqi sebagai berikut:

Tabel 4.6 Rencana Kegiatan Sekolah MI Asy Syauqi

No.	Penerimaan	Jumlah (Rp)	No	Pengeluaran	Jumlah (Rp)
1.	BOSKAB	86.000.000	1.	Gaji Guru/ Pegawai	222.500.000
2.	BOSNAS	176.000.000	2.	Belanja Barang dan Jasa	166.500.000
3.	YAYASAN (SPP jika dihitung menurut Jumlah siswa)	322.500.000	3.	Belanja Modal	109.500.000
Jumlah		584.500.000	Jumlah		498.500.000

Sumber: RKAS MI Asy Syauqi Tahun 2016, data diolah.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, sumber pembiayaan pendidikan MI Asy Syauqi Tenggarong tahun 2016 bersumber dari BOSKAB sebesar 86.000.000, sedangkan BOSNAS sebesar 176.000.000, dan dana yang bersumber dari yayasan berupa pemasukan dari infaq wajib siswa (SPP) sejumlah 322.500.000, dari data tersebut dapat dipersentasikan bahwa 15% sumber pembiayaan operasional

sekolah berasal dari BOSKAB, 30% dari BOSNAS dan 55% dari subsidi yayasan yang bersumber dari iuran wajib siswa atau SPP. Dengan demikian yayasan merupakan sumber pembiayaan terbesar dalam membantu pelaksanaan operasional pendidikan di MI Asy Syauqi Tenggarong walaupun manajemen pembiayaan masih terpisah dengan madrasah.

2. Alokasi Penggunaan Anggaran Pembiayaan Sekolah

Penggunaan anggaran sekolah merupakan bagian terpenting dalam manajemen pembiayaan sekolah, karena jika perencanaan tidak betul-betul tepat sasaran, maka tentu penggunaan anggaran hanya sia-sia tidak sesuai dengan target yang sudah menjadi visi dan misi lembaga, oleh karena itu perencanaan perlu dilakukan dengan sangat teliti dan matang dengan asesment dan analisis kebutuhan yang profesional sehingga penggunaan anggaran pembiayaan sekolah tepat sasaran sebagaimana dari tujuan pendidikan. adapun gambaran penggunaan anggaran pendidikan di tiga lembaga lokasi penelitian sebagai berikut:

a. SDIT Nurul Ilmi Tenggarong

Dalam penggunaan distribusi anggaran pembiayaan sekolah, SDIT Nurul Ilmi sudah melakukan berbagai hal prefentif mulai dari analisis kebutuhan sekolah, sampai pada proses perencanaan penganggaran yang sudah melalui beberapa tahapan seleksi ketat yang kemudian di distribusikan sebagaimana dalam perencanaan yang tertuang dalam RAPBS, dalam hal ini kepala sekolah menjelaskan sebagai berikut:

“Terkait distribusi insya Allah sudah berjalan sebagaimana yang ditargetkan, karena sekecil apapun kendala tim kami selalu cepat menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga tidak berdampak kepada hasil pencapaian yang sudah menjadi target”²⁸

Dari gambaran tersebut bahwa, SDIT sudah mencapai target hampir sempurna dari apa yang sudah direncanakan bersama, sebagaimana penjelasan lebih lanjut terkait kemana anggaran tersebut di alokasikan:

“Itu dia memang diperuntukkan untuk kegiatan pembelajaran, misalnya masalah ujian nasional kita mulai melatih mereka sejak kelas 4 untuk mengerjakan soal-soal, jadi anak-anak itu sudah terbiasa mengerjakan soal, apa lagi setelah kelas 6 mereka akan lebih fokus dengan mengikuti berbagai macam bimbel dan semua itu kita biayai tidak ada yang gratis semua guru bimbel kita bayar. Kemudian untuk sarana prasarana alhamdulillah kami sangat terbantu walaupun di dalam juknis Bosnas dan Boskab itu membantu, tapi tidak terlalu besar untuk sarana prasarana paling untuk rehab atau ngecat, tapi bantuan yang besar itu dari infaq amal jariyah orang tua termasuk untuk membangun sebagian besar gedung sekolah ini dan itu diambil tiap tahun dari orang tua rutin”.²⁹

Berkaitan dengan hal di atas, wakil kepala sekolah SDIT Nurul Ilmi

Tenggarong pun menjelaskan sebagai berikut:

“Alhamdulillah distribusi anggaran sekolah sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ya meskipun tidak 100% tapi sudah mendekati dari apa yang menjadi target. Mengenai kemana anggaran sekolah ini dipergunakan adalah sebagaimana yang telah tercantum dalam RAPBS, tentunya adalah untuk honorarium Pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian untuk operasional sekolah yang didalamnya banyak standar yang harus dibiayai sebagaimana aturan

²⁸Ahmad Zainuddin, Kepala SD IT Nurul Ilmi Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 23 April 2016.

²⁹ *Ibid*

yang berlaku. Itu sudah ada juklak juknisnya dari dinas jadi tinggal mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan”³⁰

Bendahara sekolah SDIT pun menjelaskan penggunaan anggaran sekolah SDIT:

“Untuk infaq wajib itu pasti untuk kesejahteraan guru yaitu dalam hal ini untuk penggajian guru, kemudian untuk infaq kosumsi itu untuk kebutuhan siswa kemudian untuk infaq ekstrakurikuler itu untuk siswa dalam kegiatan kemudian untuk honor guru-guru yang mengajar dalam ekschool kemudian kebutuhan sarana prasarana kemudian ada kita infaq jariah lebih dikenal disini itu infaq gedung yang satu kali dalam pembelajaran siswa itu penggunaannya ke arah yang besar, karena kita yayasan jadi apapun penggunaannya dalam RAPBS itu ada hubungannya dengan yayasan misalnya pembangunan gedung pelebaran jalan dan sebagainya. Kalau penyaluran dana Bosnas dan Boskab itu untuk operasional sekolah yang itu didalamnya ada beberapa persentase penggunaan tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih.³¹

Adapun proses pemasukan dan pengeluaran dari anggaran sekolah, bendahara sekolah SD IT Nurul Ilmi Tenggarong menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau berbicara proses pemasukan yang pertama kalau dari pusat itu biasanya masuk langsung ke rekening sekolah, tapi itu sangat berkaitan erat dengan bidang tata usaha dalam hal ini terkait dapodik ya jadi jumlah siswa yang tercantum atau yang dilaporkan secara online ke pusat berbanding lurus dengan jumlah dana yang didapatkan. Kemudian untuk dana Boskab sistemnya seperti mengurus dana bansos, jadi karena kita sekolah swasta biasanya kita ada naskah hibbah, setelah itu kita mengajukan persyaratan, setelah itu pengajuan dana, kemudian diverifikasi kalau disetujui maka nanti akan dicairkan langsung lewat bank BPD Kaltim. Kemudian pemasukan dari wali murid, mereka bayar setiap bulan, seperti infaq wajib, infaq konsumsi dan sebagainya, wali murid itu membayar setiap bulan. Kemudian untuk pengeluaran, biasanya prosesnya adalah, misalnya ada

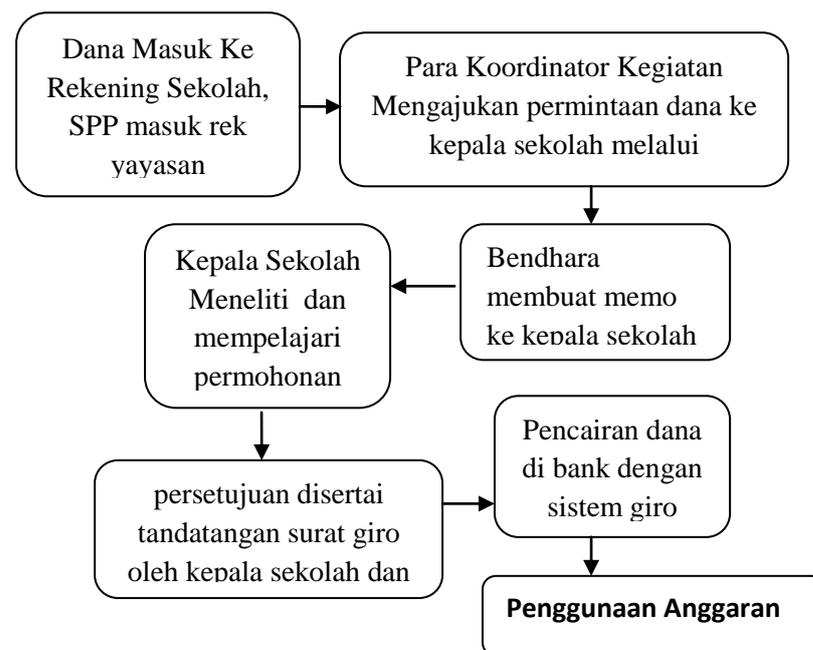
³⁰ Akhid Purwanto, Wakil Kepala SD IT Nurul Ilmi Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 23 April 2016.

³¹ Daryanti, Bendahara Sekolah SD IT Nurul Ilmi Tenggarong, wawancara di ruang bendahara sekolah tanggal 24 april 2016 pukul 09.00-10.00 Wita.

kebutuhan dari beberapa koordinator biasanya melapor ke bendahara kemudian bendahara membuat memo, setelah itu memo dibawa ke kepala sekolah untuk diteliti dan dipelajari kalau memang disetujui ada yang tidak disetujui ada nanti parafnya, kemudian karena kita menggunakan giro jadi dalam giro itu yang bertanda tangan ada dua orang dari kepala sekolah dan bendahara tidak boleh hanya satu yang bertanda tangan, itu yang membuat sah untuk bisa dicairkan setelah itu kita sampaikan kepada yang bersangkutan setelah itu ada laporan pertanggung jawaban”.³²

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa sumber pembiayaan dari pemerintah langsung masuk ke rekening sekolah. kemudian dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan seluruh program sekolah sebagaimana perencanaan dalam RKAS. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam skema berikut ini:

Gambar 4.4 Skema Prosedur Penggunaan Anggaran Pendidikan SDIT Nurul Ilmi Tenggarong



³²Daryanti, Bendahara Sekolah SD IT Nurul Ilmi Tenggarong, wawancara di ruang bendahara sekolah, Tanggal 24 april 2016.

Mengenai hambatan di dalam penggunaan anggaran sekolah sebagaimana dijelaskan wakil kepala sekolah SDIT Nurul Ilmi Tenggara sebagai berikut:

“Hambatan tidak ada yang terlalu berarti, walaupun tidak bisa kita menafikkan bahwa ada kendala-kendala dalam penggunaan anggaran, salah satu contoh kita mau menggunakan eh ternyata dananya belum cair khususnya yang dana yang dari pemerintah, maka dengan segera kita ambil langkah lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut sambil menunggu dana cair dari pemerintah. Dana dari pemerintah khususnya Boskab dan Bosnas ini memang kadang sering terlambat tidak sebagaimana jadwal seharusnya karena terkadang dari dinas mengalami hambatan-hambatan teknis”.³³

Terkait apakah perencanaan sudah sesuai dengan apa yang dilaksanakan di lapangan wakil kepala sekolah SDIT menjelaskan:

“Insya Allah tidak pernah kita melenceng dari apa yang sudah direncanakan, meskipun terkadang ada kebutuhan yang bersifat insidental ya kita bersama tim merapatkan hal itu untuk mencari jalan keluar, kalau harus merubah RAPBS maka kita adakan rapat perubahan RAPBS untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui anggaran Bosnas atau Boskab karena itu juga sudah ada aturannya sehingga membolehkan kita mengadakan RKA perubahan”.³⁴

Bendahara Sekolah SDIT juga menambahkan:

Dikatakan selalu tidak mungkin karena dalam pelaksanaannya banyak hal yang mungkin tidak seperti apa yang direncanakan, misalnya seperti tahun ini dana Boskab itu tidak ada dari pemerintah, info yang kita terima rapat terakhir dari para petinggi-petinggi disana untuk sementara ini di tahun ini dana bantuan dari pemerintah itu tidak ada sehingga itu mempengaruhi RAPBS yang kita sudah buat sebelumnya, otomatis kita harus pintar memanaj apa lagi kita sekolah swasta yang bernaung di bawah yayasan yang notabene dalam penerimaan pemasukan dari wali murid itu bukan saja untuk kebutuhan SD saja itu juga untuk cost kebutuhan sekolah yang lain seperti subsidi silang ke

³³Akhid Purwanto, Wakil Kepala SD IT Nurul Ilmi Tenggara, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 23 April 2016.

³⁴ Akhid Purwanto, Wakil Kepala SD IT Nurul Ilmi Tenggara, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 23 April 2016.

SD dan ke SMP yang dinaungi di bawah yayasan. Ketika hal itu terjadi maka salah satunya cara menanggulangi adalah pertama kita harus menyampaikan permasalahan itu kepada guru karena ini sangat berkaitan erat dengan proses operasional yang ada mungkin dari segi honorisasi, mungkin hal-hal kebutuhan operasional yang berhubungan dengan kebutuhan habis pakai itu juga diupayakan kita bisa meminimalisir penggunaan dana, tapi untuk kebutuhan hal yang besarpun misalnya untuk perbaikan-perbaikan itu kita lihat tidak harus segera diperbaiki maka kita menganulir dulu untuk tidak langsung dikerjakan pada saat ini, begitu.³⁵

Adapun untuk keberhasilan di dalam menanggulangi permasalahan yang di hadapi ditengah perjalanan dalam penggunaan pembiayaan, bendahara sekolah SDIT menjelaskan:

“Dalam perjalanan pembiayaan biasa terjadi hal yang diluar apa yang sudah direncanakan, seperti misalkan infaq wajib kadang terlambat na dalam hal ini pola yang kita terapkan adalah menyurati orang tua siswa jika keterlambatan Infaq wajib itu lebih dari 3 bulan. Karena dalam kartu Infaq wajib itu memang sudah kita berikan keterangan lebih dari 3 bulan kita akan memberikan surat tapi alhamdulillah sejauh ini kita sampe seperti itu ya karena akan sangat riskan ya yang jelas kita komunikasi dengan wali murid tetap terjaga kemudian yang kedua untuk dari yang bosnas alhamdulillah karena Bosnas itu sifatnya mengalir jadi pembiayaan yang sifatnya rutin misalnya seperti gaji para pekerja itu kan bisa diambil dari sana ya yaitu tugas kebersihan, satpam, waker itu bisa dari sana jadi kita ambil memang yang fasilitas itu dari Bosnas sumbernya, nah untuk yang Boskab ini kita bisa sama sebenarnya juknisnya seperti Bosnas Cuma ketika ada honor yang sudah kita ambil dari Bosnas dengan beberapa nama itu tidak boleh masuk ke Boskab agar tidak terjadi tumpang tindih tapi untuk pengeluaran yang lain diperbolehkan sehingga ketika ada beberapa hal yang tidak bisa kita ambil di Bosnas kita bisa siasati di Boskab nantinya ketika pencairan jadi bagaimana kita menyesuaikan dari kebutuhannya, intinya kan pelaporannya gak boleh melenceng dari juknisnya. Kalau masalah saya kira hanya persoalan waktu ya, bagaimana kita bisa memanag waktu dengan baik sehingga ketika kita disibukkan dengan permasalahan administrasi, dokumentasi dan lainnya itu membuat kita terkadang agak terlambat dalam pelaporang namun selama ini secara tertulis tidak pernah kita mendapat teguran, tapi secara global KUPT itu bisanya menyampaikan dalam pertemuan-

³⁵Daryanti, Bendahara Sekolah SD IT Nurul Ilmi Tenggarong, wawancara di ruang bendahara sekolah tanggal 24 april 2016 pukul 09.00-10.00 Wita.

pertemuan sebagai bentuk bimbingan pengarahan dan mengingatkan kalau terjadi kekeliruan dalam penggunaan atau pengadministrasian dan dalam hal ini alhamdulillah kepala sekolah selalu membackup bahkan selalu turun tangan untuk membantu apa yang bisa dibantu.”³⁶

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bawah SDIT Nurul Ilmi Tenggarong dalam mula-mula dana yang bersumber dari dana BOSNAS dan BOSKAB masuk langsung ke rekening SDIT kemudian para koordinator kegiatan segera mengajukan permintaan dana ke kepala sekolah melalui bendahara, selanjutnya bendahara membuat memo ke kepala sekolah kemudian kepala sekolah melakukan kroscek, meneliti, menelaah dan mempelajari apa yang menjadi isi dari proposal apakah sudah sesuai dengan target atau masih rancu, maka jika semua proses sudah dilalui dan mendapat persetujuan dari kepala sekolah, dana tinggal dicairkan dengan sistem giro. Adapun dana yang bersumber dari yayasan, itu sepenuhnya dikembalikan untuk kesejahteraan guru dan kariawan tenya dengan perincian anggaran penggajian guru yang diajukan oleh pihak sekolah kepada yayasan.

b. SD Muhammadiyah Tenggarong

SD Muhammadiyah Tenggarong sebagai sekolah swasta tingkat sekolah dasar yang lebih dulu maju dan lebih pengalaman didalam manajemen sekolah, maka dapat dilihat didalam penggunaan pembiayaan sudah berjalan sebagaimana juklak dan juknis dari Diknas

³⁶Daryanti, Bendahara Sekolah SD IT Nurul Ilmi Tenggarong, wawancara di ruang bendahara sekolah tanggal 24 april 2016.

Pendidikan Kukar sebagaimana hasil wawancara dengan bapak kepala sekolah SD Muhammadiyah Tenggarong sebagai berikut:

“Ya Alhamdulillah selama saya menjabat sebagai kepala sekolah itu, anggaran yang ada itu sudah sesuai dengan juknis termasuk Bosnas, Boskab dan anggaran uang sekolah SPP dan sebagainya, dan sekolah tidak akan menggunakan uang yang tidak ada di RAPBS, jadi semuanya harus sesuai dengan RAB”.³⁷

Ditambah dengan penjelasan wakil kepala Sekolah SD Muhammadiyah Tenggarong terkait dengan hal tersebut:

“Kalau bicara target distribusi anggaran ya tidak 100% lah, tapi sudah sesuai target sebagaimana RKAS yang sudah kita buat bersama-sama dengan melalui beberapa tahapan itu insya Allah bisa tercapai, jadi terkait target sudah alhamdulillah sebagaimana mestinya. Cuma kadang-kadang waktu kita menyusun anggaran itu seperti BOSKAB dan BOSNAS itukan ada petunjuk khususnya harus sesuai dengan Juklak dan Juknis, na waktu menyusun itu tidak masuk dari Juklak dan Juknisnya sehingga perlu diadakan lagi semacam RKA perubahan lah, ya bahasa kerennya begitu”.³⁸

Bendahara sekolahpun menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau kita ya harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan Dinas pendidikan, kita mengikuti aturan yang ada tapi jika itu memang ada dadakan dan tidak tercantum dalam RKA maka kita harus rapat RKA Perubahan, karena itu sudah ada aturannya. Tapi selama ini antara perencanaan dan penggunaan selalu sama kalau gak sama ya kembali ke tadi harus membuat RKA perubahan”.³⁹

Adapun kemana anggaran Sekolah itu digunakan, kepala sekolah SD Muhammadiyah Tenggarong menjelaskan:

³⁷Hariyadi, Kepala SD Muhammadiyah Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 23 April 2016.

³⁸Dardiri, Wakil Kepala SD Muhammadiyah Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 28 April 2016.

³⁹Nur Rahmadani, Bendahara Sekolah SD Muhammadiyah Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 25 April 2016.

“Anggaran-anggaran tersebut digunakan untuk keperluan sekolah, salah satunya untuk peningkatan mutu guru, yang kedua, karena disini pengembangan diri dan ekstrakurikuler banyak sekali jadi untuk pembiayaan seperti itu, juga untuk saprasnya juga, juga untuk pembangunan, misalnya untuk penambahan kelas dan sebagainya”.⁴⁰

Ditambah dengan penejelasan wakil kepala sekolah SD Muhammadiyah sebagai berikut:

“Anggaran tersebut seperti biasa digunakan untuk yang pertama penggajian guru dan kariawan secara umum kesejahteraan, kemudian kedua pembiayaan operasional kantor secara umum kemudian yang ketiga untuk menunjang program sekolah sehat ADIWIATA dari Pemerintah Kabupaten untuk meraih penghargaan ADIPURA”.⁴¹

Diperjelas lagi dengan keterangan dari bendahara sekolah bahwa:

“Untuk penggunaan itu ada 13 komponen yang pertama untuk pengembangan perpustakaan, untuk penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran dan ekskul siswa, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan-bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, pengembangan guru, pengembangan profesi guru, membantu siswa miskin, membantu pengelolaan BOS, pembelian dan perawatan perangkat komputer, tiga belas, biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s/d 12 sudah terpenuhi dana BOS, ini khusus penggunaan dana BOSKAB BOSNAS. Dan alhamdulillah sudah berjalan sukses selama 3 tahun terakhir ini”.⁴²

Terkait dengan hambatan yang dihadapi dalam menggunakan anggaran di SD Muhammadiyah sebagaimana dijelaskan:

“Alhamdulillah selama ini untuk anggaran yang telah digunakan oleh sekolah selama ini belum ada kendala, karena dari infaq orang tua siswa dan keperluan siswa memang kita diatur dalam anggaran, itu kita punya rencana jangka pendek, menengah, panjang dan keperluan apa

⁴⁰ Hariyadi, Kepala SD Muhammadiyah Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 23 April 2016.

⁴¹ Dardiri, Wakil Kepala SD Muhammadiyah Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 28 April 2016.

⁴² Nur Rahmadani, Bendahara Sekolah SD Muhammadiyah Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 25 April 2016.

yang harus kita dahulukan jadi alhamdulillah sampe sekarang tidak ada kendala”.⁴³

Proses pemasukan dan pengeluaran sebagaimana keterangan dari bendahara sekolah sebagai berikut:

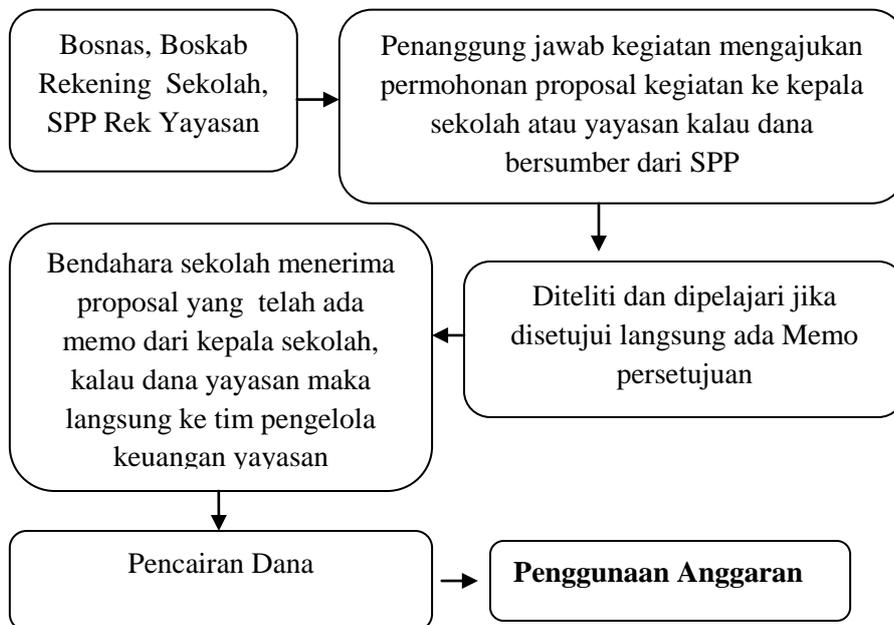
“Setiap pemasukan khususnya dana BOSKAB dan BOSNAS itu langsung ke rekening Sekolah, beda dengan SPP dan lainnya itu langsung ke rekening yayasan Muhammadiyah yang dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah tahun ini, karena Pimpinan Daerah menerapkan kebijakan Keuangan Satu Atap untuk sekluruh Amal Usaha Muhammadiyah. Sementara pengeluaran itu tidak dapat langsung ditarik lalu langsung diberikan tapi harus melalui prosedur dulu dari pembuatan proposal kemudian diajukan jika itu terkait pengeluaran dana yang banyak tapi kalau kebutuhan dana kecil yang sifatnya seperti pembelian obat-obatan untuk UKS itu tidak perlu menggunakan proposal. Tapi yang sifatnya berat seperti UTS dan Ujian Semester maka harus menggunakan proposal dengan estimasi kebutuhan dana yang jelas. Adapun pengajuannya langsung ke kepala sekolah baru memo persetujuan dari kepala sekolah akan langsung ditindak lanjuti oleh bendahara sekolah untuk dikeluarkan, artinya dananya sudah ada hanya harus melalui prosedur proposal untuk dapat mengeluarkan dana tersebut oleh bendahara sekolah”.⁴⁴

Terkait dengan alur penggunaan anggaran pembiayaan sekolah SD Muhammadiyah dimulai dari penanggung jawab kegiatan mengajukan proposal kepada kepala sekolah kemudian kepala sekolah menganalisa proposal untuk disetujui atau tidak, setelah mendapat memo persetujuan proposal, maka pelaksana tugas memberikan proposal ke bendahara sekolah untuk ditindaklanjuti untuk dicairkan sebagaimana persetujuan kepala sekolah. untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam skema berikut ini:

⁴³Hariyadi, Kepala SD Muhammadiyah Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 23 April 2016.

⁴⁴Rahmadani, Bendahara Sekolah SD Muhammadiyah Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 25 April 2016.

Gambar 4.5 Skema Prosedur Penggunaan Anggaran Pendidikan SD Muhammadiyah Tenggara



Adapun penjelasan oleh wakil kepala sekolah SD Muhammadiyah menjelaskan sebagaimana paaran data diatas bahwa terkait hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

“Masalah hambatan dalam penggunaan anggaran itu hanya persoalan Birokrasi saja, kita sudah buat proposal, proposalnya kurang, jadi proposalnya harus dirubah lagi paling kendalanya itu”.⁴⁵

Begitu juga dengan penjelasan bendahara sekolah bahwa untuk menanggulangi permasalahan distribusi anggaran maka:

“Pola pembiayaan yang berhasil itu ya harus berpacu pada ketentuan yang sudah ditentukan, semua harus kembali pada juklak dan

⁴⁵Dardiri, Wakil Kepala SD Muhammadiyah Tenggara, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 28 April 2016.

juknisnya. Jika ada dana yang harus dikeluarkan ya harus dikeluarkan jika dananya memang sudah ada”.⁴⁶

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa SD Muhammadiyah Tenggara khusus untuk dana BOSKAB dan BOSNAS itu langsung masuk ke rekening sekolah, kemudian sekolah menggunakannya sesuai dengan rencana kegiatan anggaran sekolah. proses pencairan dana harus menggunakan proposal kegiatan yang diajukan ke kepala sekolah untuk dipelajari dan dianalisis sesuai kebutuhan untuk efisiensi penggunaan anggaran. Setelah mendapat persetujuan maka proposal disampaikan ke bendahara sekolah untuk ditindaklanjuti ke tahap pencairan. Adapun terkait dana yayasan yang bersumber dari uang SPP, SD Muhammadiyah harus mengajukan proposal kepada pimpinan cabang Muhammadiyah sesuai RKAS yang telah disepakati bersama pada tahun penetapan anggaran.

c. MI Asy Syauqi

MI Asy Syauqi sebagai salah satu sekolah swasta yang berbentuk Madrasah Ibtidaiyah departemen Kementerian Agama Kutai Kartanegara yang baru sekitar 6 tahun ini berjalan dan sudah menoreh kepercayaan dari masyarakat dilihat dari peningkatan jumlah siswa setiap tahunnya. Maka terkait dari penggunaan dana MI Asy Syauqi sebagaimana penjelasan dari kepala Sekolah MI Asy Syauqi sebagai berikut:

⁴⁶ Nur Rahmadani, Bendahara Sekolah SD Muhammadiyah Tenggara, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 25 April 2016.

“Untuk alokasi anggaran itu kita sesuaikan dengan juknis pelaksanaan operasional bantuan itu sesuai juknis ada delapan standar yang harus dipenuhi yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan. kalau terjadi perencanaan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di lapangan atau hal yang mendadak membutuhkan pembiayaan maka kita sebagaimana aturan dirjen boleh kita adakan RAPBS perubahan sebagaimana kebutuhan yang diperlukan selama tidak keluar dari juklak juknis”⁴⁷

Ditambah dengan keterangan wakil kepala sekolah MI Asy Syauqi mengatakan:

“Sebenarnya sudah sesuai kalau pembiayaan SPP itu untuk honor guru sementara Bosnas dan Boskab itu diperuntukkan untuk pembiayaan operasional sekolah sebagaimana Juklak dan Juknis yang berlaku”. Kalau untuk bagian kurikulum itu banyak membutuhkan anggaran, seperti untuk penyusunan dokumen-dokumen satu dan seterusnya, arsip-arsip sekolah, terus untuk pelatihan-pelatihan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, dan kebutuhan proses pembelajaran lainnya karena sementara ini, disini masih sebelumnya menggunakan kurikulum 2013 kemudian kembali ke kurikulum KTSP karena keterbatasan yang ada dan insya Allah tahun depan akan kembali menggunakan Kurikulum Nasional atau kurikulum 2013 karena disini diwajibkan menggunakan kurikulum 2013”⁴⁸.

Diperjelas oleh keterangan dari bendahara MI Asy Syauqi sebagai berikut:

“Kalau untuk penggunaan anggaran mas, itu sudah sesuai dengan delapan standar yang diberikan oleh diknas seperti penggunaan untuk standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan, nah dari delapan standar itu kita sesuaikan dengan perencanaan di RAPBS, jadi pengeluaran tinggal mengikuti apa yang sudah tertera disana. Adapun kalau terjadi hal yang bersifat mendadak

⁴⁷Iwan Hartono, Kepala MI Asy Syauqi Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 30 Maret 2016.

⁴⁸Lilik Khairiyah, Wakil Kepala MI Asy Syauqi Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 30 Maret 2016.

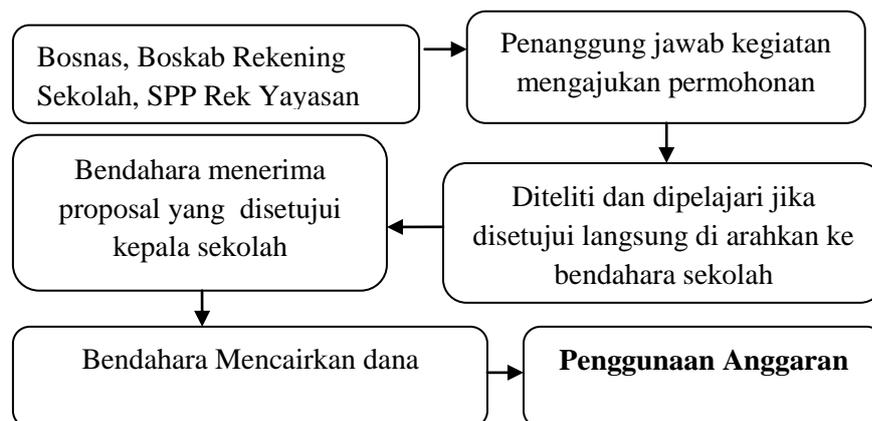
yang tidak ada didalam perencanaan, maka kita ambil langkah lain atau membuat rencana perubahan”⁴⁹

Adapun proses penggunaan pembiayaan pendidikan di MI Asy Syauqi sebagaimana hasil wawancara dengan bendahara sekolah berikut:

“Proses pemasukan dan pengeluaran sekolah, kalau pemasukan BOSNAS dan BOSKAB itu langsung ke rekening sekolah, tapi kalau dana infaq siswa dan lainnya itu langsung ke bendahara yayasan karena mereka yang kelola tidak diserahkan ke kami, kemudian proses pengeluaran boskab dan bosnas itu dengan mengacu pada RKAS yang telah disetujui, kemudian para pengguna dana mengajukan proposal ke kepala sekolah untuk disetujui”⁵⁰.

Adapun lebih jelasnya prosedur penggunaan anggaran pendidikan dapat dilihat pada skema berikut ini:

Gambar 4.6 Skema Prosedur Penggunaan Anggaran Pendidikan MI Asy Syauqi Tenggarong



Adapun yang menjadi hambatan dalam mengalokasikan anggaran sekolah sebagai berikut:

⁴⁹ Yulianti, Bendahara Sekolah MI Asy Syauqi Tenggarong, wawancara di ruang kepala Sekolah, Tanggal 30 Maret 2016.

⁵⁰ Yulianti, Bendahara Sekolah MI Asy Syauqi Tenggarong, wawancara di ruang kepala Sekolah, Tanggal 30 Maret 2016

“Adapun kendala biasanya hanya pada permasalahan keterlambatan pencairan yang dari pemerintah khususnya dana Boskab, itu biasanya keluar setelah pembiayaan terjadi, ahirnya untuk menutupi itu kita biasa mengambil langkah lain untuk dana talangan misalnya biaya operasional sekolah seperti ulangan semester dan lainnya, karena kalau hanya mengharapkan iuran wajib siswa itu hanya khusus untuk honor guru, masih belum cukup untuk sepenuhnya dalam pembiayaan operasional sekolah”⁵¹

Begitu juga dengan penjelasan wakil kepala sekolah sebagai berikut:

“Ya hambatannya paling membutuhkan dana tambahan untuk pelatihan-pelatihan, karena kalau mengandalkan dari dana yang ada maka takut akan memotong dari bagian yang lain karena sudah punya anggaran masing-masing”.⁵²

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa terkait hambatan yang dihadapi oleh MI Asy Syauqi dalam penggunaan pembiayaan hanya dalam tataran teknis saja. Yaitu sumber pembiayaan dari pemerintah khususnya BOSKAB sering terjadi keterlambatan dari jadwal seharusnya pencairan sehingga berdampak pada realisasi pembiayaan kegiatan sekolah. Sementara dana yang bersumber dari yayasan itu khusus hanya dikeluarkan untuk penggajian guru tidak masuk ke dalam perencanaan pembiayaan operasional kegiatan sekolah.

Adapun prosedur penggunaan anggaran sekolah MI Asy Syauki dari penerimaan dana bantuan pemerintah berupa BOSNAS dan BOSKAB

⁵¹Iwan Hartono, Kepala MI Asy Syauqi Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 30 Maret 2016.

⁵² Lilik Khairiyah, Wakil Kepala MI Asy Syauqi Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 30 Maret 2016.

langsung ke rekening sekolah penanggung jawab pelaksana kegiatan mengajukan proposal ke kepala sekolah, kemudian kepala sekolah menelaah kebutuhan, setelah proposal disetujui, pelaksana tugas menghadap ke bendahara sekolah untuk pencairan dana kegiatan sebagaimana yang telah disetujui oleh kepala sekolah. Adapun dana yang bersumber dari non pemerintah yaitu SPP siswa itu tidak masuk dalam rancangan RKAS sekolah karena langsung dikelola dan di distribusikan oleh yayasan khususnya untuk honorarium gaji guru MI Asy Syauqi Tenggarong sehingga terjadi pemisahan dalam pengelolaan sumber pembiayaan secara operasional dalam penggunaan anggaran penyelenggaraan pendidikan.

3. Alur Pertanggungjawaban Pembiayaan

a. SDIT Nurul Ilmi Tenggarong

Dalam usaha manajemen pembiayaan sekolah yang baik adalah tidak lepas dari pertanggungjawaban pembiayaan yang transparan dan akuntabel terhadap semua pihak, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat sekolah dan yayasan khususnya sekolah swasta. Oleh sebab itu bentuk pertanggungjawaban SDIT Nurul Ilmi Tenggarong di dalam penggunaan dana pembiayaan pendidikan melalui beberapa bentuk mulai dari pengawasan dari beberapa pihak terkait sampai kepada pelaporan bulanan/tahunan kepada berbagai pihak sebagaimana aturan yang berlaku, seperti hasil dari wawancara berikut ini:

“Untuk pengawasan dari yayasan dan dari pengawas itu secara berkala dia rutin setiap sekali sebulan, kemudian sekalis setahun disitu kita diajak untuk ya ditanyak diawasi seperti apa pembiayaan dievaluasi intens apa lagi sekarang yayasan itu luar biasa memotivasi kita,

kemudian inspektorat karena ada temuan di beberapa lembaga jadi kami jadi sempel karena banyak yang belum pajak dan termasuk kami juga belum bayar pajak..hehe, adapun yang terlibat dalam pengawasan yaitu dari pihak yayasan, inspektorat, pengawas sekolah juga, dari orang tua atau komite juga yang dilakukan setiap bulan, triwulan dan tahunan namun Alhamdulillah selama ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, alhamdulillah selama ini tidak pernah ada masalah, dan belum pernah mendapat teguran paling hanya sekedar dan alhamdulillah tanggapan pengawas juga bagus tidak ada masalah”.⁵³

Adapun bentuk pertanggungjawaban selama ini yang dilakukan oleh SDIT Nurul Ilmi Tenggarong adalah:

“Masih bentuk laporan tapi kalau bosnas ada bentuk online dan offline yang disampaikan kepada pertama diserahkan ke yayasan itu rutin setiap sekali sebulan kemudian ke dinas setiap triwulan kemudian bentuk transparansi kepada publik yang pertama yaitu dengan menempel laporan di meding agar bisa dilihat semua pihak khususnya orang tua siswa kemudian kedepan ada rencana dalam bentuk digital atau berbasis IT”.⁵⁴

Wakil kepala sekolah SDIT Nurul Ilmi pun menegaskan:

“Kalau bentuk pertanggung jawaban yang selama ini kita lakukan adalah dengan melakukan SPJ ke Dinas Pendidikan, yayasan dan sekolah berbentuk laporan tertulis sebagaimana perencanaan dan penggunaan anggaran yang sudah di distribusikan. Adapun bentuk transparansi penggunaan anggaran kita kepada publik itu dengan menempel pengumuman di papan pengumuman berapa pemasukan dan pengeluaran dan bagi siapa saja yang berkepentingan terhadap itu dipersilahkan untuk menemui bendahara sekolah untuk lebih jelasnya. Kalau bentuk digital insya Allah kedepan kita akan lakukan”⁵⁵.

Melalui bendahara sekolah SDIT Nurul Ilmi Tenggarong juga menegaskan bentuk pertanggung jawaban SDIT selama ini sebagai berikut:

⁵³Ahmad Zainuddin, Kepala SD IT Nurul Ilmi Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 23 April 2016.

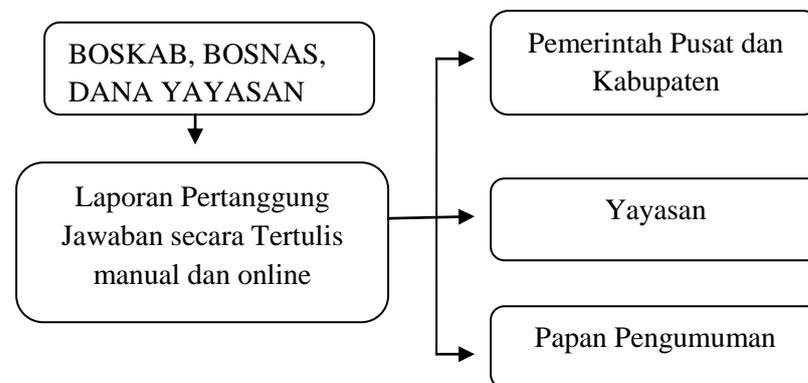
⁵⁴Ahmad Zainuddin, Kepala SD IT Nurul Ilmi Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 23 April 2016.

⁵⁵Akhid Purwanto, Wakil Kepala SD IT Nurul Ilmi Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 23 April 2016.

“Bentuk pertanggung jawaban kepada wali murid Sejauh ini dalam memang kita melakukan sebulan dua bulan sekali kita membuat semacam laporan pengeluaran tapi memang kita akui untuk mengaplikasikanya atau menempel di dinding secara teknis itu yang belum, tapi alhamdulillah untuk komunikasi kita dengan komite itu berjalan dengan baik, kemudian untuk Dana Boskab wajib ya, karena aturan Boskab kalau kita belum SPJ maka kita tidak bisa mencairkan dana selanjutnya, dan dengar-dengan Bosnas ini akan digitukan, yang ideal adalah setelah pendanaan tiga bulan sekali mengadakan laporan, jadi laporan itu kita tujuakan ke sekolah pihak orang tua melalui komite, yayasan dan pemerintah, kalau yayasan sifatnya setiap bulan karena itu berkaitan dengan pemasukan juga untuk kebutuhan yayasan jadi memang kita belum terstruktur semuanya di yayasan dikelola tapi dalam teknis apa yang dikeluarkan itu sama karena kan sudah ada musyawarahnya di awal”.⁵⁶

Lebih jelasnya dalam dapat dilihat pada skema berikut ini:

Gambar 4.7 Alur SPJ SDIT Nurul Ilmi Tenggarong



Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa, terkait pertanggungjawaban SDIT Nurul Ilmi Tenggarong dilakukan dalam bentuk laporan tertulis secara manual dan online yang disampaikan kepada pihak pemerintah dalam hal ini pemerintah kabupaten yaitu dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara dan pemerintah pusat selanjutnya SPJ juga disampaikan kepada pihak yayasan Nurul Ilmi

⁵⁶Daryanti, Bendahara Sekolah SD IT Nurul Ilmi Tenggarong, wawancara di ruang bendahara sekolah tanggal 24 april 2016 pukul 09.00-10.00 Wita.

sebagai petunjuk penggunaan anggaran baik yang bersumber dari dana pemerintah maupun sumber pembiayaan dari dana yayasan atau bantuan lainnya kemudian kepada publik biasa ditempel di mading papan pengumuman sekolah.

b. SD Muhammadiyah Tenggarong

SD Muhammadiyah Tenggarong sebagai sekolah yang sudah memiliki banyak pengalaman baik secara manajemen maupun administrasi khususnya pada pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan, maka sudah sepatutnya menjadi contoh bagi sekolah swasta lainnya yang baru mulai berkembang sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Kalau pengawasan terhadap keuangan sekolah memang kita di yayasan ini ada pengawasan, karena uang di sekolah ini ada sentralisasi jadi uang sekolah yang memegang adalah di yayasan, jadi sekolah hanya meminta pembiayaan sesuai dengan yang ada dirab atau yang diajukan, Pengawasannya dari yayasan juga sangat ketat, jadi uang itu disesuaikan dengan anggaran yang diperlukan sekolah, kemudian dari pihak independen ada dari pihak inspektorat dan juga komite sekolah, itu juga terlibat dalam pengawasan keuangan sekolah, Mereka datang keseni karena kita itu sudah kerjasama dalam kaitannya dengan keuangan ini, kalau ada sekolah itu anggaran yang sangat melenceng akan ditegur dan diarahkan maka dari itu terkadang setiap saat bahkan setiap tahun itu tiap bulan kesini. Kalau teguran untuk SD Muhammadiyah selama ini gak ada, Cuma kalau kesalahan kita diarahkan sebaiknya begini, aaa...kalau teguran alhamdulillah selama ini belum ada, tapi kalau ada yang kurang kita selalu konsultasi dengan pengawas. Intinya ya alhamdulillah selama ini saya dengan bendahara sekolah, kepala sekolah ini selalu kerjasama untuk menggunakan anggaran ini sesuai dengan juknis yang ada, kalau kita menggunakan anggaran ini sesuai dengan juknisnya insya allah tidak ada kendala dan Ya alhamdulillah selama laporan terhadap Bosnas, Boskab, sama uang sekolah yang di yayasan alhamdulillah selama ini ditanggapi positif, karena ya kita mengeluarkannya juga kebutuhannya juga untuk SPJ

nya kita kerjakan secara benar dan tidak menyimpang dari jubnis yang ada.”⁵⁷

Terkait bentuk pertanggungjawaban yang selama ini dilakukan oleh SD Muhammadiyah Tenggarong kepada pemerintah, yayasan dan publik dapat dilihat dari penjelasan wawancara sebagai berikut:

“Kalau SPJ memang kita untuk bendaharanya saja di SD Muhammadiyah itu ditangani oleh oleh tiga orang, Boskab 3 orang untuk bendaharanya sekolah sendiri itu dua orang, jadi tujuannya adalah untuk mempermudah, untuk mempercepat dalam pengerjaan SPJ BOSNAS dan BOSKAB berupa laporan bentuk dokumennya karena kita setiap triwulan kita harus SPJ ke dinas, jadi setelah semuanya selesai, SPJ itu kami serahkan kepada Dinas, selain ke dinas kita juga mempertanggung jawabkan ke yayasan, karena kita dibawah yayasan Muhammadiyah kita mempertanggung jawabkan keuangan yang kita kelola ke yayasan. Karena uang ini juga uang Negara kita juga mempertanggung jawabkan ke dinas. Adapun bentuk transparansi kita kepada publik untuk selama ini kita mempersilahkan kepada orang tua siswa, kepada yayasan atau siapapun yang berkaitan dengan sekolah ini untuk melihat atau mengoreksi SPJ yang telah dikeluarkan oleh sekolah, jadi sekolah tidak melarang kepada siapapun untuk melihat keuangan sekolah, karena kita transparan tidak menutup-nutupi SPJ, dari orang tua siswa atau yayasan masih ada keraguan *monggo* dipersilahkan melihat dan mengoreksi SPJ yang telah dikeluarkan”.⁵⁸

Wakil kepala sekolah SD Muhammadiyah Tenggarong juga mengaskan:

“Untuk pertanggung Jawaban dan laporannya itu kepada pihak-pihak terkait yang jelas pertama ke Pemkab terutama dana Boskab dan Bosnas sementara dana lainnya itu diberikan kepada pimpinan Cabang Muhammadiyah, itu terkait dengan dana SPP kalau dana Boskab Bosnas itu hanya sifatnya tembusan saja. Kalau untuk transfaransi ke publik arahan sudah ada saya sendiri sudah berapa kali minta kepada panitia pengelola dana supaya dipajang namun sampai hari ini belum

⁵⁷Hariyadi, Kepala SD Muhammadiyah Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 23 April 2016.

⁵⁸Hariyadi, Kepala SD Muhammadiyah Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 23 April 2016.

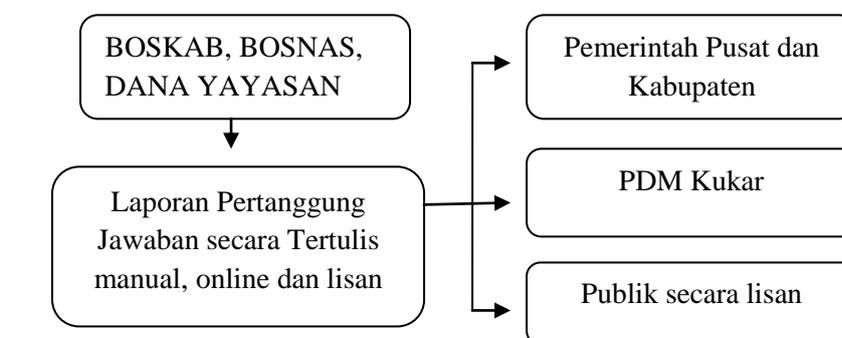
teralisasi, jadi masih bentuk ke dalam belum bentuk keluar secara publikasi media, tapi insya allah kedepan akan diusahakan ada”.⁵⁹

Adapun bendahara SD Muhammadiyah Tenggarong mengatakan bahwa:

“pola pembiayaan yang berhasil itu ya harus berpacu pada ketentuan yang sudah ditentukan, semua harus kembali pada juklak dan juknisnya. Jika ada dana yang harus dikeluarkan ya harus dikeluarkan jika dananya memang sudah ada sehingga mengSPJkan pun mudah. Untuk pertanggungjawaban itu melalui Dinas Pendidikan kukar, jika SPJ nya sudah selesai maka harus segera mengirim laporannya ke jakarta secara online baru setelah itu mengirim hasil laporan ke dinas Pendidikan menunjukkan hasil pertanggungjawaban kita kalau sudah dikatakan ok, baru kita bisa menjilid dan menyerahkan ke dinas pendidikan. kemudian menyerahkan tebusannya ke yayasan dan ke sekolah. sementara untuk transparansi ke publik selama ini memang kita belum memperlihatkan secara umum di papan pengumuman, tapi jika ada orang tua siswa ingin mengetahui pengeluaran dan pendapatan sekolah, bisa langsung menghubungi bendahara sekolah dan langsung bertanya apa yang ingin ditanyakan, insya allah kami terbuka”.⁶⁰

Terkait bentuk laporan pertanggungjawaban SD Muhammadiyah Tenggarong dan kepada siapa penyampaian laporan pertanggungjawaban itu disampaikan dapat dilihat dalam skema berikut ini:

Gambar: 4.8 Alur SPJ SD Muhammadiyah Tenggarong



⁵⁹Dardiri, Wakil Kepala SD Muhammadiyah Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 28 April 2016.

⁶⁰Nur Rahmadani, Bendahara Sekolah SD Muhammadiyah Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 25 April 2016.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa, SD Muhammadiyah Tenggara bertanggungjawabkan penggunaan anggaran dalam bentuk laporan tertulis secara manual dan online sebagaimana sistem yang sudah berlaku, laporan pertanggungjawaban diserahkan kepada pihak pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat, selanjutnya kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Kutai Kartanegara (PDM) baik penggunaan dana yang bersumber dari pemerintah maupun dari dana yayasan. Kemudian kepada publik bagi yang berkepentingan terhadap SPJ maka dipersilahkan untuk langsung mendatangi bendahara sekolah.

c. MI Asy Syauqi Tenggara

MI Asy Sayuki Tenggara yang pengalamannya realtif baru 6 tahun di dalam memanjmen sekolah sudah terbilang dapat mengejar ketertinggalan dari sekolah pendahulunya. Adapun terkait pengawasan dan bentuk pertanggungjawabannya di dalam penggunaan anggaran pembiayaan sekolah, MI Asy Syauqi Tenggara menjelaskan sebagaimana hasil dari wawancara berikut ini:

“Alhamdulillah selama saya menjabat sebagai kepala sekolah tanggapan pengawas selama ini baik karena dari target yang kami rencanakan insya Allah sudah berjalan dengan baik, adapun yang terlibat dalam pengawasan tersebut yaitu dari pihak yayasan, terus dari kementerian agama dan dinas pendidikan, juga orang tua siswa”.⁶¹

Adapun bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran sekolah MI Asy Syauqi Tenggara selama ini sebagaimana penjeleasan wawancara berikut ini:

⁶¹Iwan Hartono, Kepala MI Asy Syauqi Tenggara, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 30 Maret 2016.

“Bentuk pertanggungjawaban masih berbentuk laporan yang kita kirim, untuk Bosnas itu sudah kita kirim ke pihak Kementerian Agama di Bidang Pendidikan Madrasah, nah kemudian untuk Boskab itu kita kirim ke dinas pendidikan kabupaten kemudian kita kirim tembusan ke yayasan. Adapun kepada publik masih bersifat intern belum bersifat terbuka untuk umum, tapi kalau ada yang bertanya maka kita persilahkan langsung ke kantor. Tapi kedepan kita coba buat yang bisa diakses oleh khalayak umum sebagai bentuk transparan penggunaan anggaran sekolah kepada publik.”⁶²

Begitu juga dengan penjelasan dari wakil kepala sekolah MI Asy

Syauqi bahwa bentuk pertanggungjawaban selama ini adalah:

“Untuk pertanggung jawabannya kalau yang dari dinas itu kan kami memang ada pelaporannya setiap bulan kita mengirimkan laporan bulanan, terus data emis untuk yang ke kementerian agamanya, kalau pertanggung jawabannya ke masyarakat, disini tiap tahunnya kami mengadakan Imtihan na disitu biasanya kami sampaikan pemasukan dan pengeluaran selama satu tahun. Juga dalam bentuk pengumuman di papan pengumuman berapa dana yang masuk dan pengeluarannya kemana saja”.⁶³

Bendahara sekolah MI Asy Syauqi juga menjelaskan:

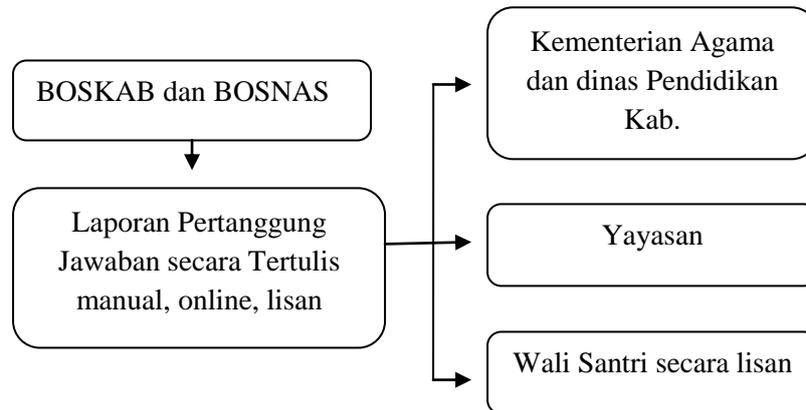
“Bentuk pertanggungjawaban yang selama ini kita buat ya dalam bentuk laporan atau SPJ yang kita sampaikan ke pihak kementerian Agama kalau itu terkait penggunaan dana yang bersumber dari Bosnas, adapun penggunaan dana dari Boskab itu kita sampaikan laporan ke dinas Pendidikan kabupaten, kemudian tembusan seluruh SPJ kita sampaikan ke pihak yayasan. Selama ini bentuk transparansi kita kepada publik biasanya disampaikan ketika akhir tahun ajaran baru bertepatan dengan acara Imtihan siswa-siswi, na disitu kita sampaikan berapa pemasukan dan pengeluaran selama setahun kepada wali murid. Kalau yang bisa di akses khalayak umum itu belum kita lakukan, namun jika ada yang berkepentingan terhadap permasalahan transparansi anggaran maka kita persilahkan disini untuk bertanya.

Dari keterangan diatas, dapat diperjelas dalam dalam skema alur pertanggungjawaban MI Asy Syauqi berikut ini:

⁶² Iwan Hartono, Kepala MI Asy Syauqi Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 30 Maret 2016.

⁶³ Lilik Khairiyah, Wakil Kepala MI Asy Syauqi Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 30 Maret 2016.

Gambar: 4.9 Skema Alur SPJ MI Asy Syauqi Tenggarong



Berdasarkan data diatas, MI Asy Syauqi menyampaikan laporan penggunaan anggaran pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten terkait dana BOSKAB kemudian kepada pemerintah pusat melalui kementerian agama kabupaten terkait penggunaan dana BOSNAS, selanjutnya disampaikan tembusan kepada yayasan atas penggunaan dana yang bersumber dari pemerintah. Terakhir disampaikan secara lisan kepada wali santri setiap acara imtihan santri MI Asy Syauqi Tenggarong. Adapun terkait dana yayasan yang bersumber dari SPP siswa pihak sekolah tidak berwenang dalam operasional penggunaan dan langsung dikelola oleh yayasan. Jadi rancangan penggajian guru dan pembangunan sekolah sepenuhnya ditangani oleh yayasan.

C. PEMBAHASAN

1. Proses Perencanaan Anggaran Pembiayaan SD Swasta di Kecamatan Tenggarong

Proses perencanaan anggaran pembiayaan pendidikan sedikitnya mencakup dua kegiatan, yakni penyusunan anggaran, dan pengembangan rencana anggaran belanja sekolah (RAPBS).⁶⁴ Dari kedua kegiatan tersebut akan terjadi proses penyusunan perencanaan anggaran sebagaimana mekanisme dari masing-masing lembaga pendidikan khususnya sekolah swasta.

Dalam penelitian ini menemukan bahwa proses penganggaran pembiayaan ketiga sekolah dasar tersebut dimulai sejak awal tahun anggaran, yaitu sejak bulan Mei sampai dengan bulan Juli. Proses tersebut diawali dengan pembentukan tim perumus sumber pembiayaan. Karena ketiga lembaga sekolah ini adalah sekolah swasta yang tidak sepenuhnya mendapat pembiayaan dari pemerintah, maka masing-masing sekolah menentukan kebijakan dalam sumber pembiayaan dan menentukan jumlah nominal dalam suatu rapat umum melibatkan seluruh sumber daya sekolah, kemudian disepakati bersama untuk dilaksanakan.

Sumber pembiayaan dari SDIT Nurul Ilimi, SD Muhammadiyah Tenggarong, dan MI Asy Syauqi Tenggarong sebagaimana temuan di lapangan, ketiga lembaga tersebut rata-rata memperoleh sumber pembiayaan dari dua ranah, yaitu dari pemerintah dan non pemerintah.

⁶⁴Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2010). Cet 3. H 257

Pertama, sumber pembiayaan dari pemerintah berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terdiri dari BOS pemerintah pusat dan BOS pemerintah kabupaten. *Kedua*, sumber pembiayaan dari non pemerintah rata-rata ketiga lembaga sekolah tersebut menerapkan kebijakan mengambil partisipasi siswa yang dinamai dengan sebutan Infaq Wajib Siswa dan Infaq Jariah/infaq sukarela sesuai kemampuan masing-masing. Infaq Wajib Siswa atau lebih dikenal dengan Sumbangan Partisipasi Siswa (SPP) terbagi dua, yaitu Infaq Wajib Pembangunan yang dibayar sekali pada tahun pertama masuk, kemudian Infaq Wajib siswa per bulan.

Dalam jurnal Brent Berion O. and Kara S. menjelaskan bahwa *“Budgeting requires that administrators prepare cash flow projections, a budgeting tool that accounts for the timing of revenue and expenditure streams. Failure to anticipate cash flows can result in liquidity/solvency problems that can undermine school operations”*.⁶⁵ Dalam proses penganggaran sebaiknya kepala sekolah harus memproyeksikan sumber pembiayaan. Jika itu tidak dilakukan maka dapat berakibat fatal dalam pembiayaan program pendidikan yang sudah direncanakan dan dapat berakibat likuiditas yang dapat merusak pembiayaan operasional sekolah.

Beberapa sumber pendapatan sesuai dengan urutan tingkat kepastian perolehan dana yaitu BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Iuran Wajib perbulan siswa, sumbangan masyarakat melalui komite sekolah

⁶⁵Berion O. Brent and Kara S. *Financial Management of New York's Charter Schools: A Normative, Descriptive, and Prescriptive Analysis*, (Taylor & Francis Group, 2009, LLC ISSN: 1558-2159 print/1558-2167 online DOI: 10.1080/15582150903425772), h. 374.

belum dapat dipastikan, APBD kabupaten/kota, Donatur (Perusahaan/ industri, Alumni, perorangan, dan sebagainya).⁶⁶ Adapun Infaq sukarela ini sesuai dari program masing-masing sekolah, ada yang menerapkan setiap hari dalam proses pembelajaran sebagai pembiasaan dalam bersedekah seperti yang dilakukan oleh SD Muhammadiyah Tenggarong, ada yang seminggu sekali setiap hari jumat, ada juga yang setiap sebulan sekali seperti yang dilakukan SDIT Nurul Ilmi Tenggarong. Ada juga yang hanya pada waktu dan momen tertentu saja seperti yang dilakukan oleh MI Asy Syauqi.

Pembiayaan pendidikan sesungguhnya adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan dan penggunaan biaya yang diperuntukan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan'.⁶⁷ Dengan demikian sumber pembiayaan merupakan bagian dari proses penyusunan anggaran pembiayaan yang sangat krusial dan berdampak terhadap kesuksesan dari pemasukan dan pengeluaran sekolah, perencanaan penggunaan dana tidak akan terjadi jika sumber pembiayaan tidak dapat dikelola secara maksimal.

Dari sumber pembiayaan diatas, ketiga lembaga itu melakukan proses manajemen yang diawali dengan penentuan waktu penyusunan anggaran. Walaupun diantara ketiga lembaga ini ada yang melaksanakan di

⁶⁶Muhaimin, "*Manajemen Pendidikan*" Aplikasinya dalam penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (Jakarta: Prenada Media Group, 2009) cet- 2, h. 357-372.

⁶⁷Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Boyolali: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 72.

akhir semester genap maupun di awal semester ganjil seperti yang dilakukan oleh MI Asy Syauqi dan SDIT Nurul Iimi Tenggara sebagaimana yang telah dijelaskan oleh kepala sekolah SDIT pada paparan data diatas. berbeda dengan di SD Muhammadiyah terbiasa melaksanakan proses penganggaran sebelum libur semester genap dilaksanakan, sebagaimana penjelasan kepala sekolah bahwa proses perencanaan dilakukan pada akhir semester genap sebelum liburan dengan maksud supaya ketika tahun ajaran baru semua sudah siap dan tinggal dilaksanakan lain.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa ada perbedaan waktu dalam memulai proses perencanaan anggaran pembiayaan, ini tidak lepas dari faktor kesiapan dan agenda masing-masing lembaga serta program sekolah yang sudah rutin dilakukan setiap tahunnya. Perencanaan sekolah yang handal tentu tidak lepas dari manajemen seorang kepala sekolah sebagai pucuk pimpinan di dalam pengelolaan sekolah. Peran kepala sekolah sebagai menejer memiliki peran yang sangat krusial dalam mencapai pendidikan yang bermutu. Karena banyaknya nominal pembiayaan belum tentu sesuai dengan hasil yang diinginkan. Kemajuan sekolah sangat tergantung dari bagaimana kepala sekolah memenaj keuangan sekolah tepat sasaran. Oleh karena itu dibutuhkan seorang kepala sekolah yang benar-benar mengerti peranya sebagai seorang manajer dan memiliki manajemen waktu sebagaimana target yang ingin dicapai.

Kepala sekolah harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi perbuatan administratif. Kemampuan untuk menerjemahkan program pendidikan kedalam keuangan merupakan hal penting dalam penyusunan anggaran belanja. Kepala sekolah harus memahami manajemen keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai yang direncanakan.⁶⁸

Pelaksanaan suatu perencanaan tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh prosedural yang sistematis dan melaksanakan berbagai tahapan dalam proses penganggaran. Hal yang paling penting pada penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yaitu bagaimana memanfaatkan dan mengalokasikan dana secara tepat sesuai target yang diinginkan. Sebagaimana dalam jurnal Berion O. Brent and Kara S. Finigan mengatakan bahwa "*school administrators should apply decision analysis techniques to identify the specific strategies articulated in a school's strategic plan*".⁶⁹ Jadi para pemimpin administrator sekolah harus mampu menganalisis seluruh kebutuhan pembiayaan pendidikan yang di tuangkan ke dalam rencana strategis suatu lembaga pendidikan.

Perencanaan pada sebuah lembaga sangat esensial, karena pada kenyataannya, perencanaan memegang peranan yang lebih penting dibandingkan dengan fungsi-fungsi lain. Tanpa ada perencanaan, maka

⁶⁸Rohiat, *Manajemen Sekolah (Teori Dasar Dan Praktik)*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h. 27.

⁶⁹Berion O. Brent and Kara S. *Financial Management* h. 373.

akan sulit mencapai tujuan. Seorang perencana pendidikan dituntut untuk memiliki kemampuan dan wawasan yang luas agar dapat menyusun sebuah rancangan yang dapat dijadikan pegangan pada pelaksanaan proses pendidikan selanjutnya.⁷⁰

Di lapangan ditemukan juga terdapat perbedaan di dalam mengidentifikasi kebutuhan sekolah. Tim SDIT Nurul Ilmi Tenggarong sangat aktif di dalam menganalisis seluruh kebutuhan sekolah dengan cara senantiasa melakukan pertemuan setiap sekali seminggu. Dari pertemuan itu seluruh masukan-masukan yang bersumber dari guru akan ditampung dan menjadi pembahasan untuk dipertimbangkan apakah layak masuk menjadi kebutuhan prioritas atau masih bisa ditunda dulu. Jadi tim SDIT Nurul Ilmi Tenggarong menyerap semua kebutuhan yang berasal dari guru dengan cara mengumpulkan pada rapat besar dan mengajukan masing-masing kebutuhan sesuai dengan bidang masing-masing.

Sementara SD Muhammadiyah Tenggarong mengidentifikasi secara tertulis kebutuhan melalui masing-masing perwakilan guru bidang studi atau wali kelas yang disampaikan kepada kepala bidang sesuai bidang masing-masing, setelah itu dari kepala-kepala bidang ini menyampaikan seluruh usulan ketika rapat perumusan RAPBS bersama tim kepala sekolah. Adapun MI Asy Syauqi mengidentifikasi kebutuhan dengan langsung kepala sekolah memanggil seluruh guru perangkat sumber daya sekolah untuk dimintai kebutuhan secara lisan kemudian diinventaris dan

⁷⁰Udin Syaefudin Sa'ud, Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 46.

digodok menjadi sebuah RKAS khusus untuk operasional sekolah yang bersumber dari dana pemerintah BOSNAS dan BOSDA.

Disamping usulan secara personil dari masing-masing pelaksana tugas, dalam pengusulan perencanaan pembiayaan juga harus memuat sebagaimana Tatjana Horvat dalam jurnalnya mengatakan bahwa “*The proposed financial plan shall contain: (1) The realization of revenue and expenditure for the past year (2) The assessment of the realization of revenue and expenditure for the current year. (3) The revenue and expenditure plan for the next year*”.⁷¹ Jadi rencana pembiayaan yang diusulkan harus memuat realisasi dari penerimaan selama setahun terakhir, kemudian adanya penilaian terhadap realisasi penerimaan dan pengeluaran untuk tahun berjalan, dan pendapatan belanja untuk tahun berikutnya.

Dalam Penelitian ini juga ditemukan perbedaan terkait sumber daya pengelolaan pembiayaan khususnya pembantu bendahara sekolah, di SDIT Nurul Ilmi Tenggarong ditemukan bendahara sekolah bukan hanya satu tapi memiliki wakil bendahara di masing-masing pos sumber pemasukan pembiayaan sekolah, begitu juga di SD Muhammadiyah Tenggarong bendahara umum sebagai penanggung jawab seluruh keuangan sekolah Cuma satu, tapi bendahara umum memiliki anggota di masing-masing sumber pembiayaan seperti wakil bendahara BOSKAB dan BOSNAS, adapun di MI Asy Syauqi tidak ditemukan pembantu bendahara yang khusus sebagai wakil bendahara, tetapi masih menggunakan satu

⁷¹Tatjana Horvat , *Leader Accountability for School Financial Management*, (<http://www.fm-kp.si/Anual World ICSEI, 2006>) h.155.

bendahara dan dibantu oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah dalam perencanaan dan pertanggungjawaban dikarenakan masih belum membutuhkan tambahan tenaga personil pengelolaan keuangan sekolah karena keuangan yang dikelola masih sedikit dan hanya pada dana yang berasal dari pemerintah yaitu BOSKAB dan BOSNAS, perbedaan ini peneliti lihat lebih kepada perbedaan kebutuhan tenaga pengelolaan keuangan. Namun sebagaimana pengakuan dari bendahara MI Asy Syauqi dengan seringnya terkendala atas keterlambatan penyelesaian laporan ke dinas pendidikan kabupaten yang berdampak pada terlambatnya proses pencairan dana, maka sebaiknya MI Asy Syauqi kedepan lebih mempersiapkan sumber daya keuangan agar tidak terjadi hal yang menghambat proses perencanaan pembiayaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pemerintah.

Kepala sekolah harus memiliki sumber daya yang handal untuk memenuhi tujuan sebuah lembaga sekolah. tidak jarang karena keterbatasan sumber daya, para pengelola harus lepas dari target yang sudah direncanakan. Adapun ketika terjadi keterbatasan sumber daya, maka para pengelola harus mengandalkan data biaya dalam memutuskan langkah apa yang dapat memberikan hasil yang optimal. Tujuan dari data tersebut adalah untuk membicarakan informasi keuangan maupun non

keuangan untuk kebutuhan manajemen sehingga mempermudah perencanaan, pengendalian, dan evaluasi sumber daya.⁷²

Jika dilihat dari cara perumusan dan identifikasi kebutuhan penganggaran yang telah dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut memang sebagian besar sudah dilakukan yang dimana ada empat langkah atau tahap dasar perencanaan yang harus dilakukan dalam proses perencanaan RKAS/RAPBS, yaitu: *Pertama*, tahapan menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, sebuah lembaga akan menggunakan sumber daya-sumber daya yang secara tidak efektif. *Kedua*, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan kondisi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. *Ketiga*, mengidentifikasi segala kemudahan, kekuatan, kelemahan serta hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan dalam mencapai tujuan, oleh karena itu perlu dipahami faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu mencapai tujuan, atau mungkin menimbulkan masalah. *Keempat*, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tahap akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan.⁷³

⁷²Letricia Gayle Rayburn, *Cost Accounting: Using a Cost Management Approach*, Terjemahan Sugyanto (Jakarta: Erlangga, 1999), h.4.

⁷³T. Hani Handoko, MBA., *Manajemen*, (Yogyakarta, 2003), edisi 2, h. 167.

Dalam proses pengembangan anggaran pembiayaan pendidikan pada umumnya menempuh langkah-langkah pendekatan prosedural seperti membentuk kelompok kerja yang dibentuk oleh kepala sekolah, yang terdiri dari para pembantu kepala sekolah memiliki tugas antara lain melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan, selanjutnya diklasifikasikan dan dilakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan. Dari hasil analisis kebutuhan biaya yang dilakukan oleh kelompok kerja selanjutnya dilakukan seleksi alokasi skala prioritas dan tidak, sedangkan yang dipandang tidak mengganggu kelancaran kegiatan pendidikan, khususnya proses belajar-mengajar maka dapat dilakukan pengurangan biaya sesuai dengan dana yang tersedia. Selanjutnya pada tingkat kerjasama dengan komite sekolah, pihak sekolah dengan kelompok yang telah terbentuk di atas, dilakukan untuk melakukan rapat pengurus dan rapat anggota dalam rangka mengembangkan kegiatan yang harus dilakukan sehubungan dengan pengembangan RAPBS. Kemudian sosialisasi dan legalitas. Setelah RAPBS dibicarakan dengan komite sekolah selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak. Pada tahap sosialisasi selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak. Tahap sosialisasi dan legalitas ini kelompok kerja melakukan konsultasi dan laporan pada pihak pengawas, serta mengajukan usulan RAPBS kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kementerian Agama untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan.⁷⁴

⁷⁴Departemen Agama, *Pedoman Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung:

Di lapangan ditemukan perbedaan dalam pengembangan perencanaan anggaran pendidikan dengan pembentukan tim perumus perencanaan pembiayaan atau lebih dikenal dengan tim pembuat Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) atau RAPBS. Kepala sekolah SDIT Nurul Ilmi Tenggarong menegaskan bahwa “pertama-tama seharusnya kepala membentuk tim perumus RKAS, dari Tim yang telah dibentuk ini nantinya senantiasa mengadakan rapat rutin setiap minggu untuk membahas perencanaan dan evaluasi dari apa yang sudah dan sedang dilaksanakan”.⁷⁵

SD Muhammadiyah Tenggarong juga demikian kepala sekolah membentuk tim perumus, mengadakan rapat intern sekolah dengan tim perumus yang terdiri dari Kepala Sekolah, Waka kurikulum, Waka Al-Islam, Bendahara Sekolah, Kepala TU, dan Kepala-kepala Bidang, melalui kepala bidang seluruh kebutuhan wali kelas dan guru bidang studi telah di inventaris sebagai bahan masukan didalam perencanaan, setelah rapat intern merumuskan RAPBS dianggap selesai baru tim mengajukan rapat bersama pimpinan daerah Muhammadiyah Tenggarong dan dihadiri komite sekolah untuk mendapatkan persetujuan.

Sedikit berbeda dengan MI Asy Syauqi yang diketahui memang masih baru dalam dunia pendidikan dan kepala sekolah belum terlalu fokus terhadap pola proses perencanaan anggaran pendidikan sebagaimana dalam ilmu manajemen, sebagaimana penjelasan kepala sekolah MI Asy

⁷⁵Ahmad Zainuddin, Kepala SD IT Nurul Ilmi Tenggarong, wawancara di ruang kepala sekolah, Tanggal 23 April 2016

Syauqi pada paparan data diatas bahwa tanpa pembentukan tim perumus langsung kepala sekolah mengumpulkan seluruh dewan guru untuk diminta masukan apa yang menjadi kebutuhan masing-masing. Adapun untuk kebutuhan penggajian guru perbulan itu langsung ditangani oleh pihak yayasan melalui dana pemasukan. Jadi sekolah hanya merumuskan rencana pembiayaan operasional sekolah yang bersumber dari pemerintah yaitu dana BOSNAS dan BOSDA.

Seharusnya MI Asy Syauqi sebagaimana yang dilakukan oleh SDIT Nurul Ilimi dan SD Muhammadiyah Tenggara hal yang pertama dilakukan kepala sekolah adalah pembentukan tim perumus. Tim ini terdiri dari kepala sekolah, waka, bendahara, Kepala TU dan para koordinator bidang. Tim inilah yang bertugas sebagai tim perumus dalam menganalisa dan menginfentaris seluruh kebutuhan pembiayaan pendidikan kemudian digodok sampai selesai baru mengadakan rapat beserta seluruh warga sekolah untuk mendengar dan jejak pendapat dari semua yang berkepentingan khususnya guru wali kelas dan guru bidang studi. Ketika itu sudah dilakukan baru menginfentaris seluruh masukan dan mengadakan perbaikan terhadap masukan yang dianggap penting. Kemudian setelah itu baru mengadakan rapat lanjutan khusus tim perumus dengan yayasan dan komite sekolah untuk mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang mengesahkan RKAS sebagaimana aturan yang berlaku dalam sekolah swasta. Terakhir mengajukan rancangan anggaran ke pihak pemerintah

jika itu terkait dengan dana BOSKAB dan BOSNAS untuk mendapatkan pengesahan.

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa ada perbedaan keterlibatan dalam proses penyusunan anggaran khususnya di MI Asy Syauqi. MI Asy Syauqi terjadi pemisahan kewenangan antara wewenang kepala sekolah sebagai pucuk pimpinan di Madrasah dengan wewenang pihak yayasan dalam pengelolaan sumber pembiayaan. Penyusunan anggaran sekolah yang bersumber dari bantuan pemerintah sepenuhnya dikelola dan dirumuskan oleh kepala sekolah dan perangkat sumber daya sekolah tanpa melibatkan pihak yayasan dalam perumusan anggaran operasional sekolah. yayasan hanya mendapat tembusan surat pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang bersumber dari pemerintah. Kemudian yayasan juga mengelola secara mandiri terkait sumber pemasukan yang berasal dari non pemerintah yaitu dari partisipasi iuran wajib siswa atau SPP sepenuhnya dikelola dan dirumuskan oleh pihak yayasan tanpa melibatkan pihak sekolah. sebagaimana hasil wawancara bahwa “masalah SPP dari infaq wajib siswa itu langsung di kelola yayasan dan penggajian guru langsung oleh yayasan.

Seharusnya kegiatan penyusunan anggaran adalah kegiatan melibatkan semua unsur pendidikan sehingga mendapatkan hasil rumusan rencana yang handal sesuai kebutuhan bersama baik itu sumber pembiayaan dari pemerintah maupun non pemerintah dengan satu tujuan untuk bersama meraih tujuan dari pendidikan. Ada tiga bagian penyusunan rencana

anggaran suatu unit atau lembaga yaitu: Target penerimaan, Rencana pengeluaran dan Sumber dana lainnya, yaitu sisa dana periode sebelumnya yang menjadi saldo awal periode berjalan. Anggaran belanja suatu sekolah pada dasarnya adalah: Penerimaan dan pengeluaran yang direncanakan dalam suatu periode kebijaksanaan keuangan. Didukung dengan data yang mencerminkan kebutuhan, tujuan, proses pendidikan, dan hasil sekolah yang direncanakan bersama-sama.

Dalam teori manajemen keuangan sekolah, penyusunan anggaran belanja sekolah dilaksanakan oleh kepala sekolah dibantu para wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakan sekolah, serta komite sekolah di bawah pengawasan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).⁷⁶ Melihat dari proses yang dilakukan oleh SDIT dan SD Muhammadiyah dengan MI Asy Syauqi sedikit berbeda dalam perumusan RKAS walau sama-sama melibatkan guru dan komite sekolah di dalam merumuskan perencanaan pembiayaan, akan tetapi yayasan sebagai penanggungjawab pendidikan swasta harus senantiasa dilibatkan dalam segala aktifitas perencanaan pembiayaan pendidikan sehingga terjadi sinergi antara tujuan pembelajaran dan tujuan institusional sebuah lembaga pendidikan. ini yang belum terjadi sebagaimana temuan dilapangan pada MI Asy Syauqi Tenggarong, begitu juga dengan pihak yayasan harus melibatkan penuh pihak sekolah dalam perencanaan penggunaan anggaran pembiayaan

⁷⁶E Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 201-204.

pendidikan yang bersumber dari iuran wajib siswa, kecuali sumber pembiayaan yayasan yang diperoleh dari sumber lain tidak ada kaitannya dengan pihak sekolah. jika kerjasama yang baik telah dilakukan, maka tentu akan menghasilkan perencanaan yang komprehensif dan memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi di dalam meraih keberhasilan bersama dari tujuan pendidikan.

Menyusun satuan pembiayaan pendidikan harus dengan cara menentukan jenis satuan dan jumlah satuan standar dan Menghitung biaya atau harga satuan. Untuk menghitung biaya satuan misalnya dengan menghitung jumlah orang, maka kita harus membuat analisis harga satuan per orang. Menyusun Rencana Biaya dan Pendapatan adalah rencana kebutuhan dana untuk setiap program dan kegiatan, baik untuk pengembangan maupun untuk operasional.

Untuk penentuan biaya rutin yang dibutuhkan seorang siswa per tahun di sekolah biasanya digunakan analisis *unit cost*. Biaya satuan siswa per tahun merupakan biaya rata-rata per siswa yang dihitung dari total biaya pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di lembaga sekolah tersebut dalam hitungan satu tahun.⁷⁷ Sementara biaya satuan siswa per jam pelajaran merupakan biaya rata-rata per siswa yang dihitung

⁷⁷Nanang Fatah, *Ekonomi*, h. 25.

dari *unit cost* per tahun dibagi total jam pelajaran yang ada di sekolah selama setahun.⁷⁸

Sebanarnya langkah-langkah dalam penyusunan anggaran pembiayaan pendidikan sebagian besar sudah dilakukan oleh ketiga lembaga sekolah tersebut seperti langkah pertama, menyusun rencana biaya. Proses penyusunan rencana biaya dan pendanaan dilakukan melalui tahap-tahap menghitung daftar biaya satuan dari semua kegiatan yang telah dirumuskan, menghitung biaya atau harga satuan yaitu dengan cara menghitung biaya satuan, menyusun rencana biaya pengembangan sekolah jangka panjang, menghitung, perkiraan sumber pendanaan dan Menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyusunan anggaran pembiayaan ketiga lembaga sekolah tersebut mengawali kegiatan penyusunan RKAS/RAPBS dengan pertama-tama pengumpulan data meskipun terdapat perbedaan dalam mekanisme pengumpulan data tapi tidak menghilangkan dari tahapan proses perencanaan pembiayaan pendidikan, kemudian tahapan selanjutnya adalah pengolahan data, pengolahan data ini pun terjadi perbedaan prosedural dalam mengolah data yang sudah terkumpul, sebagaimana yang dilakukan antara SDIT dan SD Muhammadiyah, tetapi walaupun berbeda prosedur tapi masih menggunakan sistem pengolahan data dalam perencanaan pembiayaan, berbeda dengan MI Asy Syauqi belum

⁷⁸J. Alan Thomas, *The Productive School: A System Analysis Approach to Educational Administration* (New York, London, Sydney, Toronto: John Wley and Sons Inc, 1971), h. 47.

ditemukan prosedur yang sistematis dalam pengolahan data perencanaan pembiayaan mengingat kepala MI Asy Syauqi masih lebih banyak berperan dalam segala bentuk perencanaan pembiayaan dengan alasan keterbatasan pembiayaan untuk melakukannya secara sistematis sebagaimana prosedur dalam proses perencanaan pembiayaan pendidikan. selanjutnya analisis data, analisis data sudah dilakukan oleh ketiga lembaga dengan menetapkan skala prioritas dan memfending perencanaan yang sekiranya belum terlalu penting untuk dilaksanakan pada tahun anggaran tersebut. adapun penyusunan rencana kebutuhan sekolah, dan penyusunan anggaran secara tertulis, tahapan ini pun sudah dilakukan oleh ketiga lembaga sekolah tersebut walau masih terdapat perbedaan dalam disain perencanaan, adapun dalam penyusunan anggaran secara tertulis ini SD Muhammadiyah ditemukan sangat rapi dan terinci dalam disain Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah, semua sumber masuk dalam satu disain perencanaan sekaligus lengkap dengan penggunaan anggaran, adapun SDIT Nurul Ilmi Tenggara ditemukan perbedaan bahwa ada pemisahan antara RKAS sumber pembiayaan yang dari pemerintah dan sumber pembiayaan dari yayasan, sumber pembiayaan dari pemerintah terinci dengan rapi beserta penggunaan anggaran, namun untuk dana yang bersumber dari yayasan ditemukan hanya nominal jumlah penggajian guru dalam satu tahun yang pembayarannya bersumber dari dana yayasan. Begitu juga dengan MI Asy Syauqi, ditemukan pihak sekolah sama sekali tidak memasukkan sumber pembiayaan yang berasal

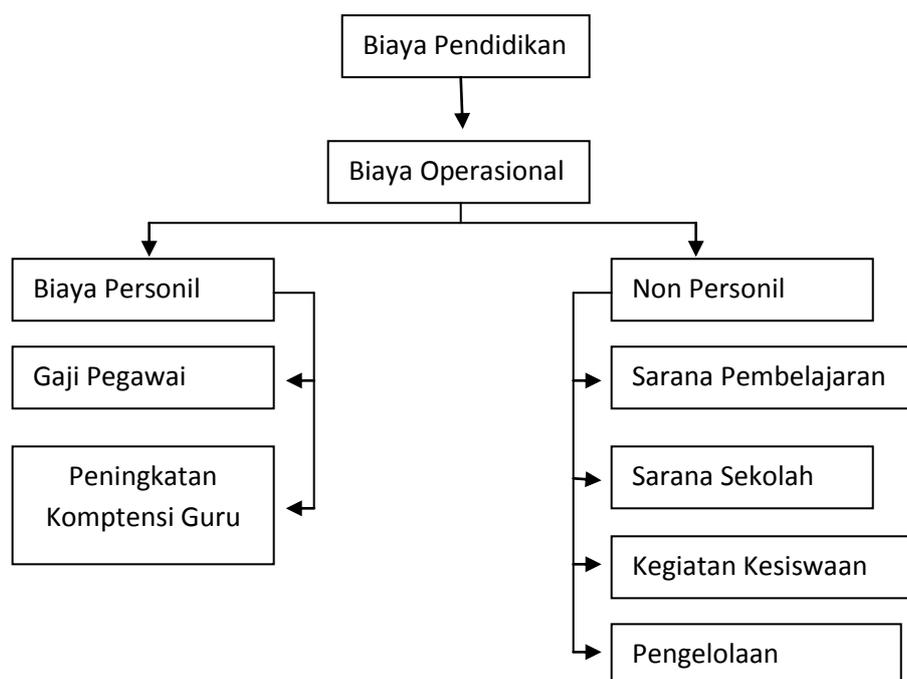
dari dana yayasan atau SPP siswa jadi hanya diketahui yayasan menggunakan pendapatan dari SPP untuk pembayaran gaji guru. Adapun sisa dari SPP keterangan dari yayasan dipergunakan untuk pengembangan pembangunan sekolah yayasan Asy Syauqi. Dan terakhir mengidentifikasi keadaan, melihat dan menimbang potensi yang tersedia dan memahami kebutuhan, keadaan dan masalah yang akan dihadapi agar perencanaan kompeten dan relevan untuk dilaksanakan agar tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.

2. Alokasi Penggunaan Anggaran Pembiayaan SD Swasta di Kecamatan Tenggarong

Berdasarkan hasil penelitian dan data dari RKAS tahun 2016 dari ketiga lembaga yang diteliti bahwa alokasi penggunaan anggaran dapat diklasifikasikan penggunaan pembiayaan SD swasta ke dalam enam aspek meliputi gaji pegawai, peningkatan kompetensi guru, sarana pembelajaran, sarana sekolah, kegiatan kesiswaan, dan pengelolaan. Dari keenam aspek ini ditemukan perbedaan dalam pengalokasian anggaran pada masing masing pos anggaran pembiayaan pendidikan. Ini tidak lepas dari perbedaan kebutuhan dari masing-masing lembaga pendidikan. dikarenakan perbedaan program dan target pencapaian tujuan lembaga pendidikan. juga terjadi karena adanya perbedaan kebutuhan sarana prasarana yang mana kebutuhan sarana sekolah maupun sarana pembelajaran tentu akan lebih banyak dibutuhkan oleh sekolah yang masih merintis daripada sekolah yang sudah maju dengan fasilitas yang telah duluan terbeli. Tinggal menambah kekurangan dan perbaikan kerusakan

seperti yang terjadi dengan SDIT dan SD Muhammadiyah bila dibandingkan dengan MI Asy Syauqi yang baru merintis sekolah tentu lebih banyak membutuhkan pembiayaan sarana prasarana sekolah dibanding dengan SDIT dan SD Muhammadiyah Tenggara. Adapun enam aspek penggunaan pembiayaan sekolah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.10 Klasifikasi Alokasi Biaya Pendidikan



Sebagaimana hasil penelitian bahwa dana yang berasal dari SPP pada umumnya digunakan untuk pelaksanaan proses belajar mengajar, pengadaan sarana dan prasarana, kesejahteraan pegawai, kegiatan belajar, penyelenggaraan UTS, UAS, US DAN UN, perjalanan dinas, pengelolaan pelaksanaan pendidikan, serta pendataan. Kepala sekolah bersama tim berwenang untuk merumuskan perencanaan RKAS namun tetap harus

mendapat persetujuan dari pihak pimpinan yayasan atas apa yang sudah direncanakan.

Adapun dana yang bersumber dari pemerintah seperti dana program bantuan operasional sekolah (BOS) harus digunakan sesuai dengan permendikbud nomor 80 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan BOS sekolah dasar dan menengah pertama, secara garis besar meliputi: Pengembangan perpustakaan, kegiatan peserta didik baru Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler, Kegiatan Ulangan dan Ujian, Pembelian Bahan Habis Pakai, Langganan Daya dan Jasa, Perawatan Sekolah/Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah, Pembayaran Honorarium Bulanan, Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, Pembiayaan Pengelolaan Sekolah, Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer, Biaya Lainnya (peralatan pendidikan, mesin ketik, obat-obatan dan peralatan uks).⁷⁹

Peraturan tersebut dilapangan oleh ketiga lembaga sudah menerapkan sebagaimana aturan main yang berlaku. Dari data yang diperoleh melalui dokumen RKAS/RAPBS bahwa ketiga lembaga tersebut telah menggunakan anggaran sebagaimana juklak dan juknis yang telah diberikan oleh Dinas pendidikan maupun kementerian agama kabupaten Kutai Kartanegara.

⁷⁹Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan, *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2015*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan, 2015), h. 27-33

Rekafitulasi alokasi penggunaan anggaran dari ketiga lembaga sebagai berikut:

Tabel 4.7 Alokasi Penggunaan Anggaran SDIT Nurul Ilmi

No.	Alokasi Anggaran	Jumlah (Rp)	Persentase
1	Kesejahteraan Guru/Pegawai	1.682.750.000	59.85%
2	Pengelolaan	18.920.000	0.67%
3	Sarana Sekolah	722.220.000	26.39%
4	Sarana Pembelajaran	74.624.000	2.73%
5	Kegiatan Siswa	245.189.000	8.72%
6	Peningkatan Kompetensi Guru	67.900.000	2.41%
Jumlah		2.811.603.000	100%

Sumber: RKAS SDIT Nurul Ilmi Tahun 2016, data diolah

Berdasarkan tabel 4.7, SDIT Nurul Ilmi Tenggara mengalokasikan anggaran 59.85% untuk kesejahteraan Guru/Pegawai, kemudian 0.67% untuk pengelolaan sebagai alokasi anggaran terkecil, 26.39% untuk sarana sekolah, 2.73% sarana pembelajaran yang berarti lebih rendah dari alokasi sarana sekolah, sekolah juga memprogramkan 8.72% untuk kegiatan siswa, dan 2.41% untuk peningkatan kompetensi guru. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa alokasi pembiayaan pendidikan terbesar pada peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik khususnya terkait honor bulanan guru karena sekolah swasta.

Sejalan dengan hasil penelitian Faith E Cramton dalam jurnalnya menjelaskan bahwa gaji guru, pengeluaran yang mendukung guru, dan pengeluaran untuk sarana prasarana memiliki dampak positif pada prestasi

siswa.⁸⁰ Dengan melihat besarnya anggaran untuk kebutuhan kesejahteraan guru dan dana penunjang peningkatan kompetensi guru, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan kualitas pendidikan di ketiga lembaga sekolah tersebut. Husnul Yakin dalam bukunya mengatakan bahwa pengembangan profesi bertujuan untuk menghilangkan kekurangefektifan kerja sebagai akibat dari ketidakmampuan karyawan untuk menyelesaikan tugas pada level yang diinginkan. Juga untuk meningkatkan tingkat komitmen karyawan terhadap organisasi dan persepsi mereka bahwa lembaga yang mereka kelola adalah tempat bekerja yang bagus dan menyenangkan.⁸¹

Rekafitulasi alokasi penggunaan anggaran SD Muhammadiyah Tenggara tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 4.8 Alokasi Penggunaan Anggaran SD Muhammadiyah

NO	Alokasi Anggaran	Jumlah (Rp)	Persentase
1	Kesejahteraan Guru/Pegawai	2.676.886.880	70.13%
2	Pengelolaan	6.275.000	0.16%
3	Sarana Sekolah	249.876.600	6.55%
4	Sarana Pembelajaran	224.191.000	5.87%
5	Kegiatan Siswa	192.276.400	5.04%
6	Peningkatan Kompetensi Guru	467.731.000	12.25%
Jumlah		3.817.236.880	100%

Sumber: RKAS SD Muhammadiyah Tahun 2016, data diolah

⁸⁰Faith E. Crampton, *Spending on School Infrastructure: does Money Matter?*” Jurnal of Educational Administration Vol.47 No.3, (Milwaukee-Wisconsin: Emerald Group Publishing Limited, 2009, h. 317.

⁸¹Husnul Yaqin, *Kapita Slektta Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.117.

Berdasarkan data tabel 4.8 diatas, maka dapat dilihat bahwa alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru/pegawai sebesar 70.13% lebih tinggi dari semua pos alokasi anggaran, sementara pos terkecil pada alokasi pembiayaan pengelolaan 0.16%, sarana sekolah 6.55% lebih besar dari alokasi sarana pembelajaran sebesar 5.87%, kemudian untuk kegiatan siswa 5.04% dan peningkatan kompetensi guru 12.25%. Dari data tersebut pos untuk sarana pembelajaran dan kegiatan siswa masih terbilang rendah. Seharusnya di pos ini perlu ditingkatkan untuk menunjang kualitas siswa sehingga berdaya saing dan prestasi.

Rekafitulasi alokasi penggunaan anggaran MI Asy Syauqi tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 5.9 Alokasi Penggunaan Anggaran MI Asy Syauqi

No	Alokasi Anggaran	Jumlah (Rp)	Persentase
1	Kesejahteraan Guru/Pegawai	222.500.000	55.58%
2	Pengelolaan	26.990.000	6.74%
3	Sarana Sekolah	107.500.000	26.85%
4	Sarana Pembelajaran	25.850.000	6.46%
5	Kegiatan Siswa	12.585.000	3.14%
6	Peningkatan Kompetensi Guru	4.900.000	1.22%
Jumlah		400.325.000	100%

Sumber: RKAS MI Asy Syauqi tahun 2016, data diolah

Dari data tabel 5.9 diatas terlihat bahwa alokasi penggunaan anggaran untuk kesejahteraan guru 55.58%, disusul dengan alokasi pada pengelolaan sebesar 6.74%, kemudian alokasi anggaran pada sarana sekolah sebesar 1.87%, sarana pembelajaran sebesar 6.46% kemudian

untuk kegiatan siswa 3.14% dan terahir untuk peningkatan kompetensi guru sebesar 1.22%. Anggaran pembiayaan operasional sekolah MI Asy Syauqi memang masih terbilang lebih sedikit bila dibandingkan dengan SDIT Nurul Ilmi dan SD Muhammadiyah Tenggara, karena MI Asy Syauqi memang terbilang masih relatif baru merintis dengan jumlah sumber pembiayaan masih mengandalkan subsidi pemerintah, adapun SPP masih murah jika dibandingkan dengan kedua sekolah diatas, sehingga berpengaruh terhadap jumlah siswa pada MI Asy Syauqi.

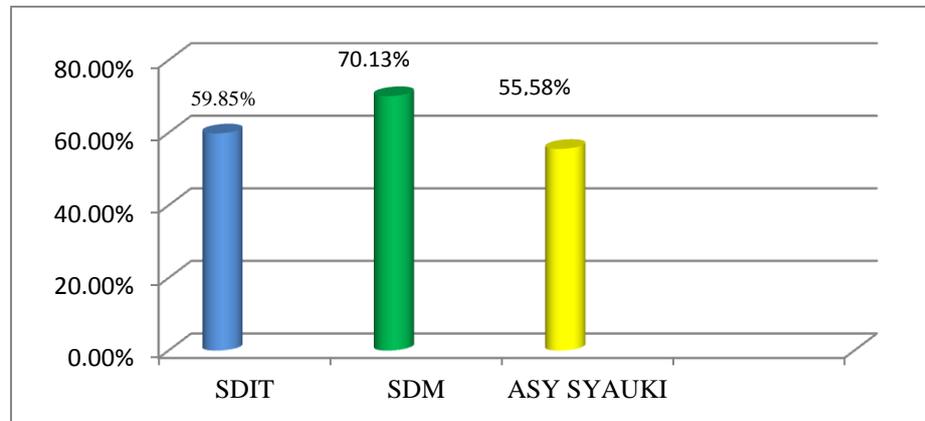
Secara teori alokasi penggunaan pos operasional sekolah, proporsi biaya dapat dibagi sebagai Gaji dan kesejahteraan guru dan pegawai lainnya 30%, Peningkatan kegiatan proses Belajar Mengajar (KBM) 25%, Dana pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan 15%, Peningkatan pembinaan siswa 10%, Rumah tangga sekolah 10%, dan Biaya pengawasan, pelaporan dan peningkatan guru serta pegawai 10%, Pengeluaran dana tersebut belum termasuk untuk pembangunan gedung baru dan serta penambahan lahan/areal sekolah.⁸² Berdasarkan teori tersebut jika dilihat alokasi penggunaan anggaran pembiayaan pada masing-masing pos anggaran masih terbilang belum proporsional sebagaimana dalam teori tersebut.

Berdasarkan data alokasi penggunaan anggaran masing-masing tiga sekolah tersebut mempergunakan anggaran sesuai dengan program masing masing sekolah dan sesuai dengan perencanaan yang telah tertuang dalam

⁸²Puslitbang Pendidikan Agama Dan Keagamaan, *Standarisasi Biaya Pendidikan Di Sekolah/ Madrasah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.

RKAS, adapun jika dipersentasekan dari enam pos penggunaan anggaran, maka untuk alokasi penggunaan anggaran gaji guru/pegawai dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Gambar: 4.11 Grafik Alokasi Gaji Guru Tahun 2016



Berdasarkan gambar grafik 4.11 diatas, maka dapat dilihat bahwa SDIT Nurul Ilmi Tenggarong mengalokasikan anggaran pembiayaan untuk gaji guru dan kariawan sebesar 59.85%. SD Muhammadiyah Tenggarong mengalokasikan anggaran pembiayaan untuk gaji guru dan kariawan sebesar 70.13% dan MI Asy Syauqi mengalokasikan anggaran pembiayaan untuk mengaji guru dan kariawan sebesar 55.58%. dengan demikian yang paling kecil mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan guru dan kariawan adalah MI Asy Syauqi, peneliti melihat ini tidak lepas dari kekuatan sumber pembiayaan yang diperoleh MI Asy Syauqi dan MI Asy Syauqi masih fokus dalam pengembangan sarana-prasarana sekolah.

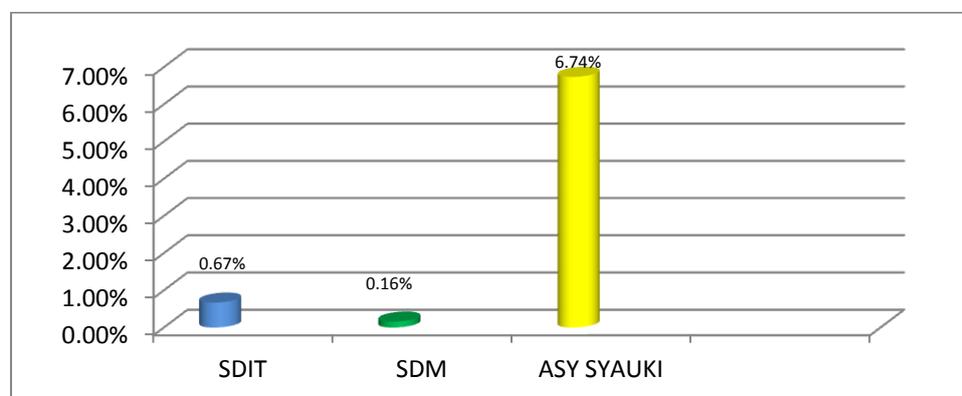
Menurut Moch. Idochi Anwar mengemukakan bahwa dari jumlah biaya langsung untuk pengajaran dan biaya langsung penunjang untuk pengajaran rata-rata berkisar pada 65% sampai dengan 70% digunakan

untuk penggajian guru. Hal tersebut disebabkan karena kualitas hasil pendidikan tergantung dari kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, dan kualitas profesionalitas guru sangat tergantung dari besaran kompensasi kesejahteraan yang diterima. Inilah yang menyebabkan kisaran persentase gaji guru lebih besar ketimbang dari unsur yang lain.⁸³

Untuk nominal gaji guru rata-rata pengeluaran tinggi sebagaimana kebijakan masing-masing lembaga, karena ini lembaga pendidikan swasta, maka kebijakan nominal gaji per guru atau kariawan biasanya ditetapkan sebagaimana kriteria peraturan yang sudah berlaku dalam yayasan, sebagian menerapkan berdasarkan lama pengabdian, prestasi dan dedikasi dari masing-masing guru atau kariawan. Sebagaimana yang diterapkan di MI Asy Syauqi, SD Muhammadiyah dan SDIT Nurul Ilmi Tenggarong.

Adapun alokasi anggaran pembiayaan untuk pengelolaan rata-rata rendah dari ketiga lembaga, lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 4.12 Grafik Alokasi Anggaran untuk Pengelolaan tahun 2016

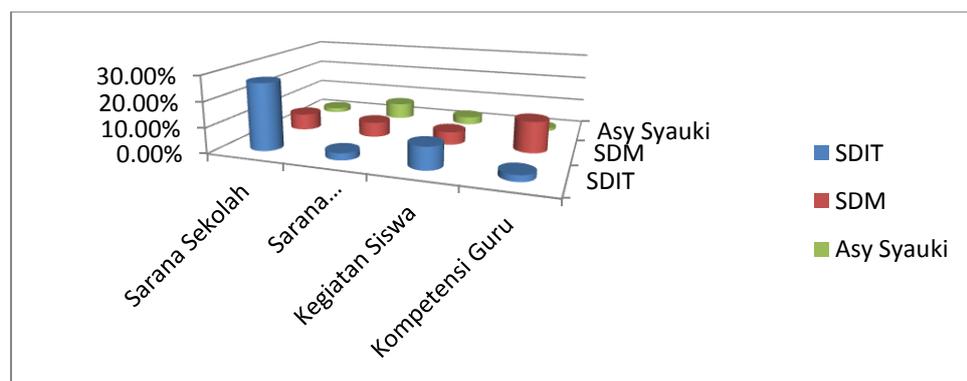


⁸³Moch. Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 152.

Dari data gambar grafik 4.12 tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara SDIT Nurul Ilmi, SD Muhammadiyah dengan MI Asy Syauqi Tenggarong dalam mengalokasikan anggaran pengelolaan. SDIT Nurul Ilmi Tenggarong mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan sebesar 0.67%. SD Muhammadiyah sebesar 0.16%. perbedaan yang signifikan antara MI Asy Syauqi ini lebih disebabkan karena MI Asy Syauqi masih dalam tahap merintis jadi untuk memprediksikan berbagai kemungkinan yang akan dihadapi sekolah dan untuk memiliki perencanaan yang mengarah pada kematangan maka MI Asy Syauqi harus mengalokasikan anggaran sebesar 6.74% untuk pengelolaan dengan maksud untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

Adapun alokasi anggaran untuk sarana sekolah, sarana pembelajaran, kegiatan sekolah dan peningkatan kompetensi guru dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar: 4.13 Grafik Alokasi Penggunaan Anggaran untuk Sarana Sekolah, Sarana Pembelajaran, Kegiatan Sekolah dan Peningkatan Guru tahun 2016



Berdasarkan data 5.3 diatas dapat dijelaskan bahwa SDIT Nurul Ilmi Tenggarong mengalokasikan anggaran untuk sarana sekolah sebesar 26.39 %, kemudian untuk sarana pembelajaran sebesar 2.73%, untuk kegiatan siswa sebesar 8.72% dan untuk peningkatan kompetensi guru sebesar 2.41%. Sementara SD Muhammadiyah Tenggarong mengalokasikan anggaran untuk sarana sekolah sebesar 6.55%, untuk sarana pembelajaran sebesar 5.87%, kemudian untuk kegiatan siswa sebesar 5.04% dan untuk peningkatan kompetensi guru sebesar 12.25%. Adapun MI Asy Syauqi mengalokasikan anggaran pembiayaan untuk sarana sekolah sebesar 1.87%, untuk sarana pembelajaran sebesar 6.46%. kemudian untuk kegiatan siswa sebesar 3.14% dan untuk peningkatan kompetensi guru sebesar 1.22%.

Jika dilihat anggaran sarana sekolah terbesar di tahun 2016 adalah SDIT Nurul Ilmi Tenggarong. Karena SDIT Nurul Ilmi tenggarong memang sedang menambah gedung sekolah untuk penambahan ruang kelas. Kemudian disusul oleh SD Muhammadiyah Tenggarong, dan terendah oleh MI Asy Syauqi dalam penggunaan anggaran sarana sekolah.

Untuk sarana pembelajaran yang tertinggi menggunakan anggaran dalam pos ini adalah MI Asy Syauqi kemudian disusul oleh SD Muhammadiyah Tenggarong dan terakhir oleh SDIT Nurul Ilmi tenggarong. Jika dilihat dalam pos anggaran sarana pembelajaran ini MI Asy Syauqi memang sedang melengkapi sarana pembelajaran yang belum

memadai, sementara SDIT dan SD Muhammadiyah sudah memiliki hanya menambah yang kurang dan memperbaiki yang rusak.

Adapun untuk kegiatan siswa tertinggi mengalokasikan anggaran adalah SDIT Nurul Ilmi Tenggarong mengingat banyaknya program kegiatan siswa dari SDIT oleh karena SDIT mengalokasikan anggaran pada pos kegiatan siswa lumayan besar. Kemudian disusul oleh SD Muhammadiyah tenggarong dan terakhir MI Asy Syauqi.

Terakhir untuk pos anggaran peningkatan kompetensi guru paling tinggi dialokasikan oleh SD Muhammadiyah Tenggarong mengingat SD Muhammadiyah Tenggarong memang sedang menggalakan peningkatan kompetensi guru sehingga mampu bertahan dari prestasi yang sudah diraih. Guru sering keluar daerah untuk melakukan studi banding melihat kemajuan sekolah sekolah maju khususnya sekolah-sekolah muhammadiyah di jawa. Juga sering mengirim guru untuk melakukan pelatihan-pelatihan meningkatkan profesionalitas guru di bidangnya. Dan sering mengadakan pelatihan-pelatihan sendiri untuk peningkatan kfasitas guru dibidangnya. Selanjutnya disusul oleh SDIT Nurul Ilmi Tenggarong dan terkhir oleh MI Asy Syauqi Tenggarong.

3. Pertanggungjawaban Pembiayaan SD Swasta di Kecamatan Tenggarong

Pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan yang lebih dikenal dengan Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD), dilaporkan setiap bulan kepada pihak yang ditetapkan sesuai dengan format dan ketepatan waktu. Khusus untuk keuangan komite sekolah, bentuk

pertanggungjawaban sangat terbatas pada tingkat pengurus dan tidak secara langsung kepada orang tua peserta didik.⁸⁴ Dilapangan pun ditemukan bahwa akses secara terbuka kepada publik khususnya kepada orang tua siswa masih terbelang belum terprogram secara profesional. Seperti yang dilakukan oleh SD Muhammadiyah dan MI Asy Syauqi masih dalam tataran sederhana jika ada orang tua siswa yang berkepentingan terhadap SPJ maka dipersilahkan langsung menemui bendahara sekolah belum bisa diakses secara terbuka oleh semua kalangan dengan program digital yang bisa diakses kapan dan dimanapun, adapun SDIT Nurul Ilmi Tenggarong terbiasa menempel di papan pengumuman dalam bentuk laporan tertulis dan itupun peneliti masih lihat tidak rutin, lain halnya jika SPJ diprogramkan dalam bentuk digital yang bisa di akses melalui internet tentu semua wali murid bisa mengakses kapan dan dimanapun dan penggunaan anggaran sekolah dapat terkontrol dengan baik ketika seluruh wali murid dapat mengakses. Tapi ketiga lembaga tersebut kedepan sudah mencanangkan program digital tersebut sehingga bentuk transparansi kepada publik benar-benar terwujud.

Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 48 menyebutkan bahwa “pengelolaan dana pendidikan harus berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik”. Proses ini harus dilakukan sebagai bentuk dari kegiatan dalam manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah sehingga

⁸⁴E Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 205-206.

apa yang menjadi tujuan pendidikan dapat tercapai.⁸⁵ Dalam permendikbud nomor 80 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan BOS sekolah dasar dan menengah pertama juga dijelaskan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana baik secara online untuk pertanggungjawaban ke pemerintah pusat maupun manual ke pemerintah kabupaten.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengawasan dan evaluasi sekolah telah dilakukan oleh pihak pemerintah dan yayasan kepada SDIT Nurul Ilmi Tenggarong, SD Muhammadiyah Tenggarong, dan MI Asy Syauqi Tenggarong, dan masing-masing kepala sekolah pun senantiasa bersama tim melakukan pengendalian keuangan agar pengeluaran tepat sasaran dan efisiensi terjadi. Hal ini dilakukan evaluasi terus setelah penggunaan maupun sebelum penggunaan anggaran dengan maksud untuk mengetahui tingkat efektifitas biaya terhadap hasil yang ingin dicapai.

Pengawasan berfungsi untuk mengetahui apakah semua program yang sudah dibiayai berjalan dengan lancar dan mengarah kepada kemajuan dalam arti pencapaian target atau sebaliknya. Karena tidak jarang terjadi penyimpangan anggaran setelah penggunaan anggaran dalam suatu kegiatan. Juga untuk segera mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan. Hasil evaluasi dan pengawasan ini harus senantiasa disampaikan kepada pihak terkait agar perbaikan yang diharapkan bisa dilakukan dengan segera.

⁸⁵Undang-undang RT No 20 Tahun 2003 *tentang sistem pendidikan nasional* (Bandung: Citra Umbara) h. 84.

Di lapangan hasil penelitian menunjukkan bahwa SDIT Nurul Ilmi dan SD Muhammadiyah Tenggarong mengadakan evaluasi seluruh penggunaan anggaran terhadap program kegiatan setiap sekali seminggu dengan seluruh tim perumus, sementara SD Muhammadiyah Tenggarong, adapun MI Asy Syauqi Tenggarong mengadakan rapat bulanan dalam mengevaluasi seluruh program kegiatan sekolah bersama para guru.

Bendahara sekolah tidak hanya melakukan pencatatan terhadap anggaran dan pembukuan proses penganggaran setiap hari, tetapi juga menyampaikan realisasi dan membuat laporan keuangan secara terperinci bersama tim bendahara sekolah. Karena seperti bendahara SDIT dan SD Muhammadiyah memiliki tim khusus untuk mengelola keuangan yang disebut sebagai bagian dari bendahara sekolah. Adapun MI Asy Syauqi masih menggunakan satu bendahara sekolah.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa laporan penggunaan anggaran sekolah dan surat pertanggungjawaban dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap disampaikan kepada kepala sekolah. selanjunya kepala sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada dinas pendidikan kukar, kemendikbud dan kementerian agama kabupaten untuk MI Asy Syauqi karena bernaung dibawah kementerian agama dan dikdas per semester. Adapun kepada publik masih disampaikan sederhana dengan bahasa lisan atau langsung bertanya kepada bendahara sekolah.

Akuntabilitas sekolah memang perlu ditunjukkan dengan membuat laporan berkala tentang penggunaan dan penyelenggaraan dana yang diperoleh dan dikeluarkan. Laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi kepada pihak pemberi dana baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah.

Berdasarkan uraian pada bab paparan data, ada beberapa perbandingan yang diperoleh dalam pengelolaan pertanggungjawaban SD Swasta di kecamatan tenggarong. Adapun perbedaan tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.9 Matrik Pengelolaan SPJ

Pengelolaan	Sekolah/Madrasah		
	SDIT	SDM	ASY SYAUQI
Laporan Pertanggungjawaban kepada pemerintah dan yayasan	Bendahara ke kepala sekolah kemudian disampaikan ke disdik kabupaten Kukar kemudian SPJ kepada yayasan	Bendahara ke kepala sekolah kemudian disampaikan ke disdik kabupaten kukar, dan kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Kukar	Bendahara ke kepala sekolah, kemudian disampaikan ke dinas pendidikan kukar dan ke kementerian agama.
Pertanggungjawaban kepada orang tua siswa	Pertemuan komite sekolah setiap semester	Pertemuan komite sekolah setiap semester	Pertemuan komite sekolah setiap semester

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban ketiga lembaga tersebut adalah masih dalam bentuk laporan secara tertulis yang disampaikan kepada dinas pendidikan kabupaten terkait dana BOSKAB, kemudian kepada pemerintah pusat untuk dana BOSNAS secara online dan manual. Juga disampaikan kepada

pihak yayasan atau pimpinan yayasan dan terakhir kepada orang tua siswa melalui papan pengumuman atau melalui rapat komite sekolah dan dapat langsung bertanya secara lisan kepada bendahara sekolah. Adapun laporan SPJ sekolah yang berbentuk digital dan online melalui websaid pribadi sekolah sehingga bisa diakses oleh siapa saja belum ada yang melakukan, namun program yang mengarah kesana sudah mulai dilakukan oleh SDIT Nurul Ilmi Tenggarong dan SD Muhammadiyah Tenggarong.